



LAPORAN KINERJA

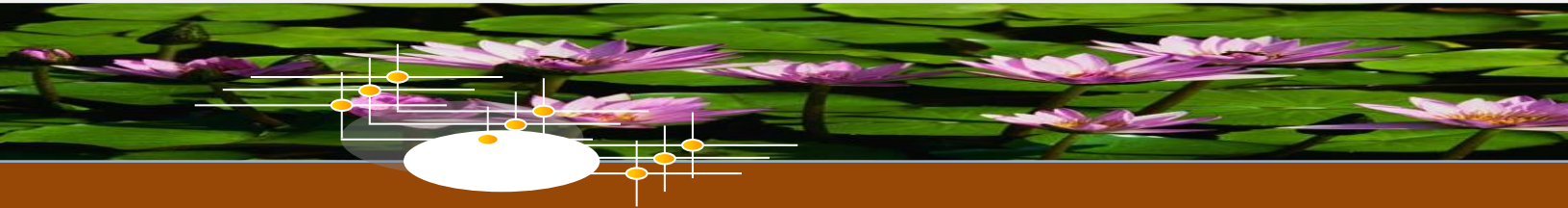
BALITBANGDA PROVINSI JAMBI



TAHUN 2018

LKj

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI**



IKHTISAR EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BALITBANGDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2018

Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat melalui Laporan Kinerja (LKj) 2018 ini.

Balitbangda Provinsi Jambi menyusun LKj ini untuk menginformasikan hasil dan mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang sudah dicapai selama 2018 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2018. LKj ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategi (Renstra) Balitbangda Provinsi Jambi 2016-2021.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari LKj Balitbangda Provinsi Jambi ini adalah sebagai berikut :

1. Balitbangda Provinsi Jambi telah merencanakan 41 Kegiatan dalam 8 Program untuk memenuhi kebijakan visi, misi, tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi Jambi. Adapun nilai capaian kinerja selama tahun 2018 menunjukkan tingkat keberhasilan Balitbangda Provinsi Jambi yakni telah berhasil melaksanakan **41 Kegiatan** dalam **8 Program**, dengan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari APBD sebesar **Rp. 4.537.069.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.385.748.382,-** atau **96,66%**.
2. Hasil capaian kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1.	Persentase Rekomendasi yang diaplikasikan <i>stakeholder</i>	80%	70%	87,50%	Tinggi
2.	Persentase Kelembagaan SIDA	80%	80%	100%	Sangat Tinggi
3.	Persentase Produk Unggulan yang dihasilkan	75%	75%	100%	Sangat Tinggi
4.	Persentase KTI dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
5.	Persentase hasil publikasi penelitian yang mampu diakses masyarakat	70%	60%	85,71%	Tinggi
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM 78	Nilai IKM 78	100%	Sangat Tinggi

3. Fasilitator dalam Penandatanganan Naskah Kerjasama antara INSTIPER Yogyakarta dengan Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Kampus INSTIPER Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2018. Kegiatan tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan, potensi dan sumberdaya yang ada (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Koperasi, Pendidikan, Perencanaan dan Penerapan IPTEKIN) secara optimal serta berkesinambungan guna percepatan pencapaian Visi Pembangunan Daerah.
4. Balitbangda Provinsi Jambi kerjasama dengan INSTIPER Yogyakarta dalam Pembangunan Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan di Provinsi Jambi, meliputi :
 - Kegiatan Pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi di bidang pembangunan perkebunan, pertanian dan kehutanan berbasis potensi unggulan daerah di Provinsi Jambi.
 - Sinergi Pemberdayaan Masyarakat dalam pendampingan di bidang pembangunan perkebunan, pertanian dan kehutanan berbasis hasil penelitian, pengembangan, penerapan Ilmu pengetahuan Teknolkgi dan Inovasi.
5. Balitbangda Provinsi Jambi memperoleh Anugerah sebagai Balitbangda Berkinerja Utama yang ke empat kali dari Kemenristekdikti pada tanggal 13 Desember 2018 di BSD Tangerang..
6. Hambatan yang membuat pelaksanaan program kegiatan menemui kesulitan/kendala dalam pencapaiannya, antara lain :
 - belum optimalnya peranan Balitbangda Provinsi Jambi dalam memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pembangunan.
 - belum memanfaatkan secara optimal hasil-hasil kajian dan pengembangan inovasi oleh OPD lain dalam upaya percepatan pencapaian target untuk pembangunan.

- masih kurangnya sarana prasarana berupa kendaraan operasional untuk mendukung kelancaran kegiatan penelitian di daerah.
 - kurang memadainya Sumber Daya Manusia aparatur baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk saat ini peneliti dan calon peneliti yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi berjumlah 11 orang, tetapi yang aktif untuk saat ini berjumlah 9 orang dikarenakan 2 orang mengikuti tugas belajar program Strata 3.
7. Langkah dan Upaya Peningkatan Peran Strategis dalam menghadapi kendala-kendala :
- perkuatan peran Balitbangda Provinsi Jambi dalam memberikan rekomendasi kepada OPD lain dalam upaya percepatan pencapaian target untuk pembangunan;
 - penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
 - sosialisasi dan publikasi hasil-hasil penelitian sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selaku pengguna teknologi (dibuat website hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi);
 - perlu meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi fungsional peneliti untuk menarik minat pegawai dalam rangka rekrutmen calon peneliti (penambahan SDM fungsional peneliti) untuk mengisi jenjang jabatan peneliti dalam rangka kaderisasi sekaligus jabatan fungsional peneliti pada era pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;
 - meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga litbang lokal, nasional dan internasional (swasta dan pemerintah); dan
 - terus mengupayakan dan mengusulkan peningkatan sarana prasarana penunjang yang memadai.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Jambi Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan selama periode satu tahun, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Bahwa tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara garis besar Laporan Kinerja Tahun 2018 ini berisikan informasi tentang tingkat keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja (*Performance Plan*) Tahun 2018, yang mengacu pada Rencana Strategis 2016-2021 Balitbangda Provinsi Jambi. Disisi lain Capaian Kinerja (*Performance Result*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama Tahun 2018 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang telah ditetapkan.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja ini yang merupakan pertanggungjawaban kinerja dan diharapkan dapat dijadikan bahan untuk melihat tingkat keberhasilan dalam menjalankan program dan kegiatan selama setahun terakhir serta dijadikan bahan perbaikan-perbaikan kinerja untuk mencapai efisiensi dan efektifitas oleh seluruh Aparatur Balitbangda Provinsi Jambi ke depan.

Bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, maka atas saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun diucapkan terima kasih.

Jambi, 2018
KEPALA BALITBANGDA PROV. JAMBI

Ir. AZRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19662404 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF LKj TAHUN 2018	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Gambaran Umum Balitbangda Provinsi Jambi.....	2
E. Isu Strategis Balitbangda Provinsi Jambi	7
F. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategi	9
B. Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi	9
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
D. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	23
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	25
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	26
D. Akuntabilitas Keuangan	43
BAB IV PENUTUP	49
A. Capaian Keberhasilan di Bidang Penelitian.....	49
B. Hambatan	52
C. Solusi.....	52
D. Kesimpulan.....	53
E. Saran.....	53
F. Lain-lain.....	53
LAMPIRAN- LAMPIRAN	55
1. MATRIKS RENSTRA	
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
3. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2018	
4. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019	
5. STRUKTUR ORGANISASI BALITBANGDA RPOVINSI JAMBI	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Visi Gubernur Jambi 2016-2021	10
Tabel	2.2.	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi	13
Tabel	2.3.	Keterkaitan Visi, Misi Balitbangda Provinsi Jambi dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan	16
Tabel	2.4.	Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program (pilihan)	18
Tabel	2.5.	Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Jambi	19
Tabel	2.6.	Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2018	21
Tabel	3.1.	Kerangka Pengukuran Kinerja	24
Tabel	3.2.	Skala Nilai Peringkat Pengukuran Kinerja	24
Tabel	3.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2018	25
Tabel	3.4.	Pencapaian Kinerja Sasaran Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2018	26
Tabel	3.5.	Pencapaian Target Misi	26
Tabel	3.6.	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	27
Tabel	3.7.	Analisis Pencapaian Sasaran 1	27
Tabel	3.8.	Analisis Pencapaian Sasaran 2	28
Tabel	3.9.	Analisis Pencapaian Sasaran 3	28
Tabel	3.10.	Analisis Pencapaian Sasaran 4	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.	Penyerahan Anugerah Balitbangda Berkinerja Utama oleh Dirjen RI Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng., Sc., P.Hd. kepada Kepala Balitbangda Provinsi Jambi Ir. Azrin, M.Si.	49
Gambar	2.	Foto bersama malam Penyerahan Anugerah Balitbangda Berkinerja Utama di BSD Tangerang (Ir. Azrin, M.Si., Nomor 3 dari Kiri dan Prof. Aspri Jaya Bakri Walikota Sungai Penuh Nomor 4 dari Kiri)	50
Gambar	3.	Sertifikat Balitbangda Provinsi Jambi sebagai Balitbangda Provinsi Berkinerja Utama dalam Penguatan SIDA Tahun 2018 ..	50
Gambar	4.	Penandatanganan kerjasama Kepala Balitbangda Provinsi Jambi (Batik Hitam) dengan Pimpinan Instiper Yogyakarta (Batik Merah) yang disaksikan dengan Plt. Gubernur Jambi Dr. H. Fachrori Umar, M.Hum. (Batik Kuning)	51
Gambar	5.	Foto bersama Plt. Gubernur Jambi (Batik kuning) dengan Pimpinan Instiper Yogyakarta usai Penandatanganan Mou dan Penandatanganan kerjasama oleh beberapa OPD Provinsi Jambi termasuk Balitbangda Provinsi Jambi dan Kuliah Umum yang disampaikan oleh Dr. H. Fachrori Umar, M.Hum.	52



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah Sistem Pelaporan Akuntabilitas.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pengganti Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menyusun LKj. Laporan wajib disampaikan secara tertulis, secara periodik dan melembaga.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). Penyusunan LKj Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Provinsi Jambi antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi; dan
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

D. Gambaran Umum Balitbangda Provinsi Jambi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pasal 20 menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan pembangunan daerah Iptek yang dituangkan dalam "Rencana Strategis Pembangunan Iptek di daerah".

Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Provinsi Jambi tidak terlepas dari kerangka pembangunan Iptek Nasional karena Provinsi Jambi merupakan bagian integral dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Iptek di Provinsi Jambi harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Bidang Iptek dan juga tidak terlepas dari arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi karena pembangunan Iptek bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri melainkan menyatu dengan sektor-sektor lain dan itu semua merupakan salah satu bagian dari tugas yang diemban oleh Balitbangda Provinsi Jambi selain menjalankan Program Penelitian dan Pengembangan.

Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) pada prinsipnya untuk menunjang terwujudnya visi dan misi Jambi TUNTAS (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera). Namun pada kenyataannya Program Kegiatan yang dilaksanakan OPD tidak semuanya dapat berjalan lancar dalam mencapai tujuan fungsional. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya tidak melalui proses pengkajian atau diteliti terlebih dahulu, sehingga banyak kegiatan yang salah sasaran dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Menyadari peran penting Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 5 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi dengan Kategori Tipe A yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

Balitbangda Provinsi Jambi merupakan Unit Organisasi eselon II/a di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping tugas yang diemban tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- 2) Penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- 3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- 4) Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan provinsi;
- 5) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi dan teknologi;
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- 7) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah provinsi;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada balitbangda; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Balitbangda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar OPD dan lembaga yang berkompeten terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait permasalahan sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi berbagai regulasi dan kebijakan.
2. Bersama OPD lainnya merumuskan agenda Program Legislasi Daerah dan kebijakan daerah melalui naskah akademik
3. Mengkaji isu-isu strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat dan pelayan publik
4. Melakukan kegiatan Litbangda sesuai prioritas daerah dan kebutuhan OPD berdasarkan instrumen Program Jambi TUNTAS 2016-2021.

5. Melakukan kajian dan inovasi terhadap implementasi regulasi/kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dan holistik terhadap pemerintah daerah.

Untuk optimalisasi kinerja kelembagaan Balitbangda Provinsi Jambi didukung oleh upaya peningkatan kapasitas penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan, ketatalaksanaan dan peningkatan kompetensi peneliti serta sumber daya manusia. Disamping itu sumber daya manusia pada Balitbangda Provinsi Jambi juga didukung oleh organisasi lain yang secara fungsional merupakan mitra Balitbangda Provinsi Jambi antara lain : Dewan Riset Daerah (DRD), Tim Evaluasi Kebijakan dan Program, Operasional Jaringan Penelitian Daerah (Jarlitda), Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Balitbangda Provinsi Jambi, Operasional Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sentra Promptek), Penyebarluasan Hasil Litbang melalui Jurnal Khazanah Intelektual, Perumusan Naskah Akademik, Pengkajian Perda serta Pergub.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Jambi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, dengan susunan terdiri dari 1 orang pejabat eselon II (Kepala Badan), 5 pejabat eselon III (1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang) dan 15 pejabat eselon IV (3 Kasubbag dan 12 Kasubbid) dan untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut atau seperti bagan terlampir dalam LKj ini.:

Balitbangda dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu oleh 1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang yaitu :

- 1) Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- 2) Bidang Sosial dan Kependudukan
- 3) Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 4) Bidang Inovasi dan Teknologi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balitbangda mempunyai SDM sebanyak 76 orang pegawai yang terdiri atas :

1. Pejabat struktural sebanyak 20 orang
2. Pejabat fungsional Peneliti 9 orang
3. Fungsional umum 38 orang
4. Tenaga Harian Lepas 9 orang

Sedangkan tugas dan fungsi masing masing jabatan eselon III pada Balitbangda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Sekretariat

Tugas : membantu badan dalam rangka mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat

Fungsi :

1. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama kelitbang;
2. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumatanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
4. pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
3. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
4. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
5. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
6. pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
7. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
8. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
9. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sosial dan Kependudukan

Tugas : melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, melaksanakan koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang sosial dan kependudukan.

Fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
3. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;

4. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
5. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
6. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Tugas : melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang ekonomi dan pembangunan.

Fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
3. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
4. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
5. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
6. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Inovasi dan Teknologi

Tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, konfirmasi, konsultasi pelaksanaan inovasi dan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi, diseminasi kelitbangan.

Fungsi :

1. penyiapan data dan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, rekayasa, koordinasi, konsultasi, konfirmasi di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
2. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan anggaran penerapan hasil penelitian/pengkajian, rekayasa serta koordinasi, konsultasi, konfirmasi di bidang difusi, inovasi dan penerapan teknologi;
3. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan anggaran kegiatan seminar/ workshop, pameran/promosi iptek, fasilitasi HKI, koordinasi, konsultasi, konfirmasi di bidang diseminasi kelitbangan inovasi dan teknologi;
4. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian/pengkajian, rekayasa, pengembangan inovasi teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi, diseminasi kelitbangan;
5. penyiapan bahan, penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi, konfirmasi pelaksanaan penguatan kelembagaan sistem inovasi daerah (SID), penguatan kelembagaan penelitian/pengkajian; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.

Fungsi :

- a. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- b. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala badan.
- c. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lengkap bagan struktur organisasi Balitbangda Provinsi Jambi dapat dilihat pada lampiran LKj ini.

E. Isu Strategis Balitbangda Provinsi Jambi

Ada beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi Balitbangda Provinsi Jambi, antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian oleh OPD maupun masyarakat;
Keberadaan Baltbangda Provinsi Jambi, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan OPD Provinsi Jambi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah.
2. Sinkronisasi penelitian dengan kebutuhan pembangunan Provinsi Jambi;
Peran strategis yang diharapkan dari keberadaan institusi Litbang pada era otonomi daerah juga terkait dengan perannya dalam pembangunan lptek di daerah adalah sebagai institusi Pemerintah Daerah yang melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan Litbang. Koordinasi dan fasilitasi tersebut diperlukan dalam rangka sinkronisasi, sinergi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan Litbang di daerah.
3. Keterbatasan kompetensi staf, pejabat dan peneliti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi;
4. Pendanaan untuk penelitian belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jambi;
Dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, Balitbangda Provinsi Jambi memperoleh porsi anggaran yang sangat terbatas/kecil. Minimnya anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Balitbangda Provinsi Jambi menjadikannya sulit berkembang.
5. Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbang. Karena belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan; dan
6. Masih terbatasnya aktivitas riset yang mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah.

Langkah strategis mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi Balitbangda Provinsi Jambi, antara lain

1. Menata sistem penentuan topik penelitian yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Litbang prioritas secara lebih selektif.

2. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, melalui :
 - Penyediaan dan penyebarluasan kertas kerja kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief) kepada para pemangku kepentingan;
 - Publikasi hasil kelitbangan melalui berbagai bentuk media cetak dan elektronik, seperti penulisan ilmiah terakreditasi, seminar nasional dan diskusi publik.
3. Memberikan apresiasi pelaksanaan inovasi daerah kepada OPD dan masyarakat umum serta mahasiswa yang menemukan teknologi tepat guna.
4. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (*problem solving*) melalui pemanfaatan hasil Litbang.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kelitbangan.
6. Peningkatan kualitas dan sinergisitas program kelitbangan dengan OPD di Pemerintahan Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkas/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018 berdasarkan pada dokumen perencanaan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2018 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Balitbangda dalam rangka peningkatan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021
2. Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Provinsi Jambi 2016-2021
3. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2018
4. Jakstrada Iptekin
5. Renja
6. RKPD

A. Rencana Strategi

Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Balitbangda Provinsi Jambi. Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Gubernur Jambi terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Jambi dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Balitbangda Provinsi Jambi tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jambi Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Jambi Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Balitbangda Provinsi Jambi merupakan hasil kesepakatan bersama antara Balitbangda Provinsi Jambi dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Balitbangda Provinsi Jambi tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Jambi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Balitbangda Provinsi Jambi dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Strategik dengan berpedoman pada RPJMD dan Visi Misi Gubernur terpilih, meliputi :

Visi Gubernur Jambi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi adalah terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera.(TUNTAS) Tahun 2021, yakni :

Tabel 2.1.
Visi Gubernur Jambi 2016-2021

TERTIB	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pada pelayanan publik.
UNGGUL	1.Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan kesetaraan gender 2.Meningkatkan daya saing daerah dan optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis 3.Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
NYAMAN	1.Meningkatkan daya saing daerah dengan mengoptimalkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri 2.Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi, mengelola energi baru dan terbarukan serta pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
TANGGUH	1.Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal 2.Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi, mengelola energi baru dan terbarukan serta pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
ADIL	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pada pelayanan publik.
SEJAHTERA	1.Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal. 2.meningkatkan kualitas SDM yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan kesetaraan gender 3.Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi dan mengelola energi

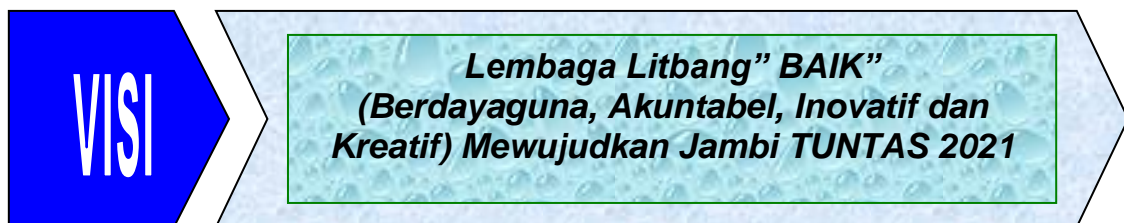
Adapun Misi yang ditetapkan dalam rangka mencapai Visi tersebut di atas adalah yaitu :

- 1) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2) Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan kesetaraan gender;
- 3) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesetaraan hukum;
- 4) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;.

- 5) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- 6) Terwujudnya masyarakat Jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

Dari Visi dan Misi Jambi TUNTAS 2021 yang telah ditetapkan dimaksud, Balitbangda Provinsi Jambi dalam mendukung program kegiatan pembangunan masuk pada Misi ke 4 yakni "Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan

- a. **Visi Balitbangda Provinsi Jambi** untuk 5 (lima) ke depan yang ingin dicapai adalah :



B erdayaguna	berkemampuan dalam memberikan hasil penelitian dan bermanfaat bagi masyarakat
A kuntabel	hasil penelitan dapat dipertanggungjawabkan baik sumber, proses dan hasilnya.
I novatif	terus berinovasi, mencoba hal-hal baru bagi kemaslahatan orang banyak.
K reatif	mampu menciptakan suatu yang baru baik berupa gagasan ataupun kebijakan.

Pernyataan Visi mengandung makna :

1. Berdaya guna artinya berkemampuan dalam memberikan hasil penelitian dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Akuntabel dimaksudkan agar hasil penelitan dapat dipertanggungjawabkan baik sumber, proses dan hasilnya.
3. Inovatif bermakna terus berinovasi, mencoba hal-hal baru bagi kemaslahatan orang banyak.
4. Kreatif artinya mampu menciptakan suatu yang baru baik berupa gagasan ataupun kebijakan.

Dari visi tersebut mengandung makna bahwa rekomendasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang direpson pemerintah daerah, melalui organisasi perangkat daerah dan *stakeholder* lain di wilayah Provinsi Jambi sebagai landasan setiap kebijakan dalam rangka untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menuju Jambi TUNTAS 2021.

Sedangkan Misi Balitbangda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh *Stakeholder*.
 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
 3. Mendorong pemanfaatan iptekin dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah.
- b. **Tujuan**, sesuai dengan misi yang diembannya maka tujuan yang akan dicapai oleh Balitbangda Provinsi Jambi adalah:
1. Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh *Stakeholder*.
 2. Meningkatkan inovasi dan teknologi daerah dalam mendukung daya saing daerah.
 3. Meningkatnya publikasi hasil penelitian.
- c. **Sasaran**, sasaran yang ingin dicapai Balitbangda Provinsi Jambi adalah :
1. Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan *Stakeholder*.
 2. Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah.
 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian.

Untuk melihat secara detail keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Balitbangda Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MISI 1 : Pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh Stakeholder								
1	Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh Stakeholder	Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan Stakeholder.	Persentase rekomendasi yang diaplikasikan Stakeholder	70 %	75%	80%	80%	80%
MISI 2 : Penguatan Sistem Inovasi Daerah								
2	Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Daerah dalam mendukung daya saing daerah	Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk Unggulan dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah	1. Persentase Kelembagaan SIDa	80%	80%	80%	80%	80%
			2. Persentase Produk Unggulan yang dihasilkan	70%	75%	75%	75%	80%
			3. Persentase KTI dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%

MISI 3 : Mendorong pemanfaatan Iptekin dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah								
3	Meningkatnya publikasi hasil penelitian	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil Penelitian	Persentase hasil publikasi yang mampu diakses masyarakat	60%	70%	70%	75%	80%

- d. Strategi**, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi:
1. Menata sistem penentuan topik penelitian yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Litbang prioritas secara lebih selektif.
 2. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, melalui :
 - Penyediaan dan penyebarluasan kertas kerja kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief) kepada para pemangku kepentingan;
 - Publikasi hasil kelitbangan melalui berbagai bentuk media cetak dan elektronik, seperti penulisan ilmiah terakreditasi, seminar nasional dan diskusi publik.
 4. Memberikan apresiasi pelaksanaan inovasi daerah kepada OPD dan masyarakat umum serta mahasiswa yang menemukan teknologi tepat guna.
 5. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (*problem solving*) melalui pemanfaatan hasil Litbang.
 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kelitbangan.
 7. Peningkatan kualitas dan sinergisitas program kelitbangan dengan OPD di Pemerintahan Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi.
- e. Kebijakan**, untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan menggunakan strategi yang ditetapkan maka kebijakan pokok yang diambil oleh Balitbangda Provinsi Jambi selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah:
1. Mendorong pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas.
 2. Fasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan masyarakat.
 3. Mengoptimalkan aspek-aspek pendukung guna peningkatan kualitas penyelenggaraan kelitbangan.

Untuk lebih detailnya dilihat dilihat dari tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan dapat dilihat pada matrik berikut :

Tabel 2.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategi Balitbangda Provinsi Jambi

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Langkah Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B A I K	Pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh <i>Stakeholder</i>	Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh <i>Stakeholder</i>	Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Mendorong Pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata sistem penentuan topik penelitian yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Litbang prioritas secara lebih selektif. 2. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (<i>problem solving</i>) melalui pemanfaatan hasil Litbang. 3. Peningkatan kualitas dan sinergisitas program kelitbangan dengan OPD di Pemerintahan Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi. 4. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, melalui penyediaan dan penyebarluasan kertas kerja kebijakan (<i>policy paper</i>) dan risalah kebijakan (<i>policy brief</i>) kepada para pemangku kepentingan. 5. Mendorong pengembangan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung kelitbangan antara lain : gedung, perpustakaan, website dan display inovasi, dan 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kelitbangan.
	Penguatan Sistem Inovasi Daerah.	Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Daerah dalam mendukung daya saing daerah	Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk Unggulan dan meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya	Fasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan apresiasi pelaksanaan inovasi daerah kepada OPD dan masyarakat umum serta mahasiswa yang mengembangkan teknologi tepat guna dan KTI. 2. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD terkait Pemerintah Provinsi Jambi dan Balitbangda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi 3. Melaksanakan publikasi Lomba TTG dan KTI bentuk media cetak dan elektronik

			Ilmiah serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah		
	Mendorong pemanfaatan iptekin dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil Penelitian	Menyebarkan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna	Penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna

- f. **Program Prioritas**, program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program yang telah ditetapkan Balitbangda adalah a) Program Penelitian dan Pengembangan, b) Program Penguatan Kelembagaan Litbang c) Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Bidang Inovasi dan Teknologi.

Tabel 2.4.
Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program (pilihan)

Tujuan	Sasaran	Program
Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi penelitian dan pengembangan oleh <i>Stakeholder</i> hasil dan oleh	Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Program Penelitian dan Pengembangan
Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Daerah dalam mendukung daya saing daerah	Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk Unggulan dan meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil Penelitian	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan

Selain itu Balitbangda mengakomodir kebutuhan penelitian dari usulan OPD baik provinsi maupun kabupaten/kota.

1. Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan

- (1) Koordinasi Litbang Daerah dan Penguatan Kelitbangan Kegiatan:

- a. Menghadiri forum kerjasama litbang daerah Provinsi Jambi (Jaringan Penelitian, DRD, Forum DRD Regional Sumatera)
- b. Diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian kepada *stakeholders* terkait (Penerbitan Jurnal Litbang, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Inovasi TTG, dan Pameran TTG)
- c. Menjalin komunikasi berkesinambungan dengan lembaga litbang daerah, nasional maupun intenasional (Rakorlitbangda, Rakornas Litbang, Rakor Peneliti, Rakor Jarlit, Rakor FKPPD, Workshop dan Temu Bisnis, Seminar dan Sidang Paripurna di DRN)

- d. Menghadiri pertemuan forum kelitbang tingkat daerah, nasional dan internasional (Rakorlitbangda, Rakornas Litbang, Rakor Peneliti, Rakor Jarlit, Workshop dan Temu Bisnis serta Rakor FKKD/DRD Wilayah Barat dan Regional Sumatera)
- e. Melakukan fasilitasi Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis/ Unggulan, Hak Kekayaan Intelektual HKI

Indikator Kinerja :

Jumlah koordinasi dan sinergitas dengan *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan kegiatan litbang pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta perguruan tinggi (perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan rekomendasi)

(2) Peningkatan Sumber Daya Manusia

Kegiatan:

- a. Bintek tenaga fungsional peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan bintek penunjang lainnya
- b. Peningkatan kapasitas tenaga Litbang melalui pelatihan dan pendidikan, seminar dan studi banding, Workshop dan sejenisnya.
- c. Penyediaan sarana penunjang kegiatan Litbang yang memadai.

Indikator Kinerja:

Jumlah tenaga fungsional peneliti yang memiliki bidang keahlian dibidangnya serta dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah

Kegiatan :

- a.. *Science Park* di Provinsi Jambi
- b.. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui Pelatihan dan Rapat Koordinasi SIDa

Indikator Kinerja:

Tersusunnya Dokumen Perencanaan *Science Park* di Provinsi Jambi

Terlaksananya penguatan SIDa melalui koordinasi antar sektor maupun pelaku SIDa di provinsi/kabupaten/kota dengan pusat.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

IKU (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Jambi untuk periode waktu tahun 2010-2015 sesuai periode Renstra adalah sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Hitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan	Persentase Rekomendasi yang diaplikasikan <i>stakeholder</i>	Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016	Balitbangda	Laporan Akhir Kegiatan

Stakeholder.		(Rekomendasi yang sudah diaplikasikan/Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan) X 100%		
Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk Unggulan dan meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kelembagaan SIDa 2. Persentase Produk Unggulan yang dihasilkan 3. Persentase KTI dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan 	<p>Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 03 Tahun 2012 dengan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah</p> <p>Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah</p> <p>Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (Kelembagaan SIDa yang terbentuk/Kelembagaan SIDa yang digali) X 100% 2. (Produk Unggulan yang sesuai persyaratan IG/Produk Unggulan yang digali) X 100% 3. (Jumlah KTI dan TTG yang menjadi juara /Jumlah KTI dan TTG yang menjadi juara) X 100% 	Balitbangda	Laporan Akhir Kegiatan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian	Persentase hasil publikasi penelitian yang mampu diakses masyarakat	<p>Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016</p> <p>(Jumlah Informasi yang bisa diakses/Jumlah total Informasi yang ditampilkan) X 100%</p>	Balitbangda	Laporan Akhir Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>IKM = Nilai Persepsi pada angka 3, Nilai Interval Konversi = 78 Mutu Pelayanan B Kriteria Baik</p>	Balitbangda	Laporan Akhir Kegiatan

D. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Penetapan/Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka telah dijabarkan dalam sasaran secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal maka untuk mencapai tujuan strategis, Balitbangda Provinsi Jambi telah menyusun Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun 2018. Sepanjang tahun tersebut Penetapan/Perjanjian Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi telah dibuat sebanyak sekali yaitu pada Penetapan Program/Kegiatan Tahun 2018.

Tabel 2.6.
Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Persentase Rekomendasi yang diaplikasikan <i>stakeholder</i>	80%
2	Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk Unggulan dan meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah	1. Persentase Kelembagaan SIDa 2. Persentase Produk Unggulan yang dihasilkan 3. Persentase KTI dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan	1. 80% 2. 75% 3. 100%
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian	Persentase hasil publikasi penelitian yang mampu diakses masyarakat	70%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM 78

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Pelayanan Adminsitasi Perkantoran	821.034.300,00	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	378.480.000,00	APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45.000.000,00	APBD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49.090.000,00	APBD
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	18.081.000,00	APBD
6. Program Penelitian dan Pengembangan	2.178.098.250,00	APBD
7. Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	981.128.450,00	APBD
8. Program Pengembangan Inovasi dan teknologi Daerah	612.088.000,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	5.000.000.000,00	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.
Skala Nilai Peringkat Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76 \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1.	Persentase Rekomendasi yang diaplikasikan <i>stakeholder</i>	80%	70%	87,50%	Tinggi
2.	Persentase Kelembagaan SIDA	80%	80%	100%	Sangat Tinggi
3.	Persentase Produk Unggulan yang dihasilkan	75%	75%	100%	Sangat Tinggi
4.	Persentase KTI dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
5.	Persentase hasil publikasi penelitian yang mampu diakses masyarakat	70%	60%	85,71%	Tinggi
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM 78	Nilai IKM 78	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rekomendasi yang diaplikasikan *Stakeholder* mencapai angka 87,50% hanya 70% dari 80% dari target yang ditetapkan. Pada bidang Inovasi dan Teknologi ditunjukkan oleh Indikator Kinerja Persentase Kelembagaan SIDA, Persentase Produk Unggulan yang dihasilkan dan Persentase KTI dan

Teknologi Tepat Guna (TTG) mencerminkan keberhasilan yang mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk Indikator Kinerja Persentase Hasil Publikasi yang mampu diakses masyarakat tidak mencapai target (85,71%) hanya 60% dari 70% target yang telah ditetapkan. Akan tetapi capaian indikator tersebut masih berada dalam kategori tinggi. Hal ini disebabkan tidak semua hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Balitbangda Provinsi Jambi bisa diterbitkan dalam Jurnal Khazanah Intelektual Balitbangda Provinsi Jambi karena dalam jurnal tersebut juga menerima hasil jurnal dari penulis lainnya. Untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah sesuai dengan target yang ditetapkan (100%) dengan nilai IKM 78. IKM yang diukur disini adalah kepuasan pegawai Balitbangda Provinsi Jambi yang dapat dilayani dalam hal administrasi perkantoran, kepangkatan, maupun kesejahteraan pegawai.

C. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Balitbangda Provinsi Jambi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 6 (enam) indikator kinerja.

Berdasarkan Tabel 3.3. di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	-
2	Sesuai Target	66,67 %
3	Tidak Mencapai Target	33,33 %

Dari sebanyak 4 Sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 4	6	0	0	4	66,67	2	33,33
	Jumlah	6	0	0	4	66,67	2	33,33

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 4	6	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0
2	Sesuai Target	4	66,67 %
3	Tidak Mencapai Target	2	33,33 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7.
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan *Stakeholder*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Rekomendasi yang diaplikasikan <i>stakeholder</i>	Persentase	80%	8	100.00	100	100	100.00	80%	70%	87,50

Sasaran 2

Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk Unggulan dan meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8.
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk Unggulan dan meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelembagaan SIDa	Persentase	80%	8	100.00	100	100	100.00	80%	80%	100%
2	Persentase Produk Unggulan yang dihasilkan	Persentase	80%	8	100.00	100	100	100.00	75%	75%	100%
3	Persentase KTI dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan	Persentase	80%	8	100.00	100	100	100.00	100%	100%	100%

Sasaran 3

Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9.
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase hasil publikasi penelitian yang mampu diakses masyarakat	Persentase	0	0	0	0	0	0	70%	60%	85,71%

Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10.
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
			1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	0	0	0	0	0	0

Pencapaian sasaran kegiatan berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Program Penelitian dan Pengembangan dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.736.490.750.- terealisasi sebesar 96,40%. Terdiri dari 19 judul penelitian, sebagai berikut :

PENELITIAN MANDIRI

1. *Efektivitas Implementasi Pengelolaan Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit Menuju Sustainable Development Goals di Kabupaten Batanghari, adapun saran/rekomendasi hasil penelitian :*
 - a. Perusahaan agar menyediakan tenaga pengelola lingkungan dengan latar belakang pendidikan dan atau kompetensi pengelola lingkungan, sehingga pengelolaan lingkungan menjadi tugas pokok tersendiri yang didukung oleh ketersediaan struktur di perusahaan terkait pengelolaan lingkungan.
 - b. Perusahaan agar melakukan koordinasi dan terlibat dalam perencanaan rutin pemerintah seperti Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk menjalankan mandat kewajiban perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR.
 - c. Perusahaan agar bekerjasama dengan instansi terkait program pemberdayaan masyarakat yang akan diwujudkan, dengan melakukan pendekatan 3 elemen pemerintah, perusahaan dan masyarakat di dalam upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang baik dalam mendukung pencapaian SDGs.
2. *Skenario Kebijakan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Batanghari (Alternatif Strategi Penataan Kawasan Orang Kayo Hitam Muara Bulian) adapun Saran/Rekomendasi hasil penelitian :*
 - a. Pertimbangan untuk penataan kawasan OKH harus komprehensif, tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan biaya pembangunan, namun kebijakan yang terkait aspek waktu, keamanan keselamatan, fisik rumah pengganti, sarpras di kawasan relokasi, dan akses ke pusat layanan menjadi variabel krusial untuk diaplikasikan. Aspek dampak menjadi penting sebagai indikator keberhasilan kebijakan relokasi warga Orang Kayo Hitam Muara Bulian.

- b. Relokasi Ganti Bangun Rumah hendaknya dilakukan dengan memperhatikan fisik rumah dan lokasi yang memadai. Pola kerjasama dengan developer bisa menjadi alternatif implementasi relokasi.
 - c. Mengingat sejauh ini masyarakat Jambi cenderung memunggungi sungai, saatnya kebijakan Pemda Batanghari dan Pemprov Jambi menempatkan Sungai Batanghari sebagai ikon daerah, karena sesuai konsep Water Front City. Tentunya harus tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan warga yang bermukim di pinggiran sungai.
3. *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara Online di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi (Studi di Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Jambi dan Desa Kampung Pulau Kecamatan Pamayung), adapun saran/rekomendasi hasil penelitian :*
- a. Dengan Implementasi Sistem Keuangan Desa secara Online pada seluruh Desa di Kabupaten Batanghari, hendaknya dapat dijadikan percontohan untuk implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bagi Desa-desa lain yang belum Online di Indonesia terutama Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
 - b. Dinas Kominfo atau dinas teknis terkait lainnya perlu melakukan pembinaan, dalam memberikan panduan bagi desa tentang berapa kapasitas jaringan (Bandwith) yang ideal dalam mendukung implementasi Siskeudes secara Online, sesuai kondisi jaringan di desa-desa dan alternatif solusi terhadap permasalahan jaringan telekomunikasi.
 - c. Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, dan Dinas Kominfo bersama Bagian Hukum, perlu melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait pengelolaan keuangan desa guna mendukung pelaksanaan e-village government.
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan perlu lebih ditingkatkan dan terus dilaksanakan, guna memberikan pemahaman yang memadai kepada aparatur pemerintahan desa. Pemerintahan di atasnya (Provinsi atau Kementerian) terkait perlu membuat standar kompetensi melalui fungsi pengelolaan sumber daya manusia aparatur berupa kegiatan penilaian kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa, sehingga dapat dijadikan dasar pendukung dalam menentukan pemberian kompensasi, pengembangan, dan pemberhentian sumber daya perangkat desa.
 - e. Perlu komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder di Pemerintah Kabupaten Batanghari terkait penetapan pagu indikatif serta penetapan anggaran (dalam APBD Kabupaten) yang akan didistribusikan ke setiap desa, dengan mempertimbangkan waktunya dengan siklus anggaran desa. Sehingga pemerintah desa diharapkan dapat mengikuti siklus anggaran dan menetapkan APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember.
4. *Keputusan Petani Berusaha Tani Jagung dengan menerapkan Teknologi Budidaya Jenuh Air (Studi kasus di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjab Timur), adapun Saran/Rekomendasi hasil penelitian :*
- a. Diharapkan bagi pemerintah setempat memberikan pendidikan non formal dan lebih meningkatkan perhatian serta pembinaannya kepada petani agar pengetahuan mereka semakin bertambah dalam penerapan teknologi tersebut sehingga memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan produksi jagung di daerah tersebut.
 - b. Petani perlu meningkatkan pengalamannya dalam menerapkan BJA karena teknologi BJA sesuai dengan kondisi wilayah di lokasi penelitian.

- c. Belum adanya jaminan harga dan pasar untuk komoditas jagung pada saat panen, untuk itu perlu kemitraan dengan pihak swasta untuk menampung hasil panen petani.
 - d. Pemerintah setempat diharapkan dapat memperbaiki kinerja lembaga perekonomian mikro yang ada di Kelurahan Simpang dalam membantu mengatasi masalah petani dalam permodalan yang tidak memberatkan petani pada saat melakukan pinjaman dengan suku bunga yang rendah.
 - e. Diharapkan Lembaga penelitian juga turut mendukung penerapan teknik Budidaya Jenuh Air dengan penelitian lanjutan
 - f. Penyuluh mensosialisasikan teknologi BJA melalui penyuluhan secara rutin dengan sasaran yang lebih meluas tentang terobosan baru yang dapat meningkatkan produktivitas jagung terutama pada lahan pasang surut di daerah lain yang dilakukan dengan cara demplot.
 - g. Perlu dipikirkan agar paket teknologi yang ditawarkan kepada petani merupakan paket teknologi dengan biaya produksi rendah namun memberikan keuntungan yang pantas, sehingga usahatani dapat dilaksanakan oleh petani secara swadaya dan berkesinambungan.
 - h. Untuk penelitian lanjutan, perlu dikaji penilaian keberhasilan program BJA dengan melakukan perbandingan antara wilayah yang berhasil melaksanakan BJA dan wilayah yang belum berhasil melaksanakannya.
5. *Kajian Implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Jambi, adapun Saran/Rekomendasi hasil penelitian :*
- a. BPJS Kesehatan dimungkinkan untuk dapat bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dalam rangka pendataan dan penyelarasan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.
 - b. Perlu peran aktif semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah) termasuk BPJS Kesehatan dalam merelisasikan kepesertaan (UHC) di Provinsi Jambi.
 - c. BPJS Kesehatan perlu mempertimbangkan untuk memberikan kebijakan pelayanan bagi peserta mandiri yang tidak bayar iuran dengan kategori tidak mampu bayar, lambat bayar, dan malas bayar.
6. *Pengaruh Pinjaman Usaha Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Studi kasus pada BAZNAS Provinsi Jambi), adapun saran/rekomendasi hasil penelitian :*
- a. BAZNAS perlu meningkatkan alokasi dana pinjaman usaha produktif kepada usaha kecil dan lebih diprioritaskan kepada pelaku usaha kecil yang kategorinya miskin, sehingga dapat membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
 - b. Pemberian pinjaman usaha produktif dari BAZNAS sangat bermanfaat bagi peningkatan pendapatan usaha kecil, namun BAZNAS perlu menseleksi calon penerima pinjaman secara seksama sehingga sasaran penerima dapat lebih tepat dan pemanfaatannya tidak disalahgunakan oleh penerima pinjaman.
 - c. Perlu adanya pendampingan, pelatihan dan pengawasan rutin dari BAZNAS kepada penerima Pinjaman agar penerima pinjaman dapat lebih profesional dalam memanfaatkan pinjaman usaha tersebut untuk pengembangan modal usaha mereka.
 - d. Kepada para penerima pinjaman usaha produktif agar tidak menyalahgunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan selain untuk pengembangan usahanya apalagi kalau digunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak berdampak pada pengembangan usahanya.

- e. Pemerintah perlu memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS, seperti yang terurai dalam laporan tahunan BAZNAS kepada pemerintah sehingga BAZNAS dapat berperan lebih dalam penanggulangan kemiskinan yang secara tidak langsung juga membantu menaikkan citra positif pemerintah dimata masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.
7. *Model Pemberdayaan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adapun saran/rekomendasi hasil penelitian :*
- a. Dinas Perikanan perlu meningkatkan motivasi pembudidaya sehingga budidaya ikan tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan sampingan atau hobbi yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan pembudidaya ikan melalui :
 - Pembinaan dan penyuluhan secara intensif
 - Menyediakan pasar yang baik bagi pembudidaya ikan sehingga mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak
 - Memberdayakan keluarga pembudidaya (istri) membuat makanan olahan dari ikan dalam upaya memperoleh perluasan pasar
 - b. Seiring dengan kemajuan tehnologi budidaya ikan, maka Dinas Perikanan dan Kelautan perlu meningkat Kompetensi PPL sebagai aktor yang melakukan *sharing knowledge* kepada pembudidaya ikan dengan cara selalu mengikuti perkembangan tehnologi terbaru melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Membangun sinergisitas antara Dinas perikanan sebagai leading sektor dengan Dinas perindag, Dinas Koperasi dan UMKM. Artinya pihak pengambil kebijakan dalam melakukan program pemberdayaan UKM (pembudidaya ikan) perlu duduk bersama, membahas dan meninjau kembali tupoksi dalam usaha melaksanakan program pemberdayaan , sehingga tidak terjadi over laping atau tumpang tindih program dalam usaha meningkatkan kemampuan UKM. Untuk menghindari over laping atau tumpang tindih program perlu dilakukan pemetaan kegiatan mengenai program yang hendak dicapai yang disesuaikan dengan tupoksi masing-masing.
8. *Kinerja Pendamping Desa Dalam Pengawasan Dana Desa, adapun Saran/Rekomendasi hasil penelitian :*
- a. Pemerintah Pusat dalam merekrut pendamping desa juga harus melihat domisili dari para pendamping desa atau lebih mengutamakan putra/putrid aerah yang ada, agar dalam melakukan pendampingan bias mendampingi dengan baik karena jarak ke lokasi yang dekat dan juga dengan lebih mengutamakan putra/putrid daerah maka akan lebih mengenal daerah tersebut, sehingga apa yang menjadi kebutuhan desa atau masyarakatnya menjadi lebih dipahami.
 - b. Untuk mengatasi kebijakan atau peraturan yang berubah-ubah seperti Peraturan Menteri Desa TT atau dari pemerintah pusat yang ada penyempurnaan-penyempurnaan di setiap tahunnya. Untuk itu pendamping desa sebaiknya banyak melakukan sosialisasi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi, agar desa yang didampingi bias lebih memahami dan mengerti, agar tujuan dari adanya perubahan yang ke arah lebih baik tidak menyulitkan dan menjadi beban baik dari pendamping maupun untuk desa.
 - c. Untuk menjamin kualitas para pendamping desa perlu diberikan sertifikasi profesi bagi para pendamping desa. Sertifikasi bagi pendamping desa sangat penting, sebab dengan adanya sertifikasi akan lebih menjamin hak rakyat dalam memperoleh pendampingan dari orang-orang yang berkompeten.

- d. Penilaian kinerja secara berkala dan kontinyu terhadap pendamping desa. Penilaian kinerja merupakan sebagai alat evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan serta sebagai bagian penting dalam program pengembangan kapasitas pendamping desa. Hasil penilaian menjadi umpan balik atas kinerja pendamping desa, dan menjadi acuan bagi penguatan dan perbaikan kinerja pendamping desa di masa yang akan datang.
- e. Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui BPMD secara berkala melakukan penguatan kapasitas tenaga pendamping desa dalam bentuk pelatihan, sesuai kebutuhan. Terutama sekali kepada pendamping desa yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat desa yaitu para PLD (Pendamping Lokal Desa), sehingga upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat desa melalui program “pendampingan Desa” dapat tercapai sesuai tujuan.

9. *Kajian Komoditas Unggulan Subsektor Perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi, adapun Saran/Rekomendasi hasil penelitian :*

- a. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen dan mendorong pengembangan komoditas yang akan ditetapkan sebagai komoditas unggulan subsektor perkebunan daerah, berdasarkan hasil riset komoditas unggulan yang berpeluan untuk menjadi komoditas unggulan adalah kelapa sawit dan kako (coklat), untuk tanaman kakao berpeluang bear dalam pengembangan areal, namun kelapa sawit perlu dipertimbangkan karena cukupnya kelapa sawit ditanam pada lahan yang tidak sesuai menurut analisis berdasarkan agro ekologi zona.
- b. Memetakan kembali areal tanaman kelapa sawit yang sesuai agro ekologi zona dan mengkaji secara ekonomis areal tanamn sawit yang tidak sesuai agro ekologi zona.
- c. Menerapkan konsep agribisnis dan mengembangkan hilirisasi produk dalam rangka peningkatan kualitas produk sesuai permintaan pasar berupa barang setengah jadi atau barang jadi.
- d. Dukungan *stakeholder* terkait dalam bentuk program baik fisik maupun non fisik oleh OPD Perkebunan, Disprindag, PUPR dan Pihak Swasta secara berkesinambungan dalam mendukung pengembangan agribisnis komoditas yang menjadi prioritas komoditas unggulan daerah.

PENELITIAN KEBIJAKAN ANTISIFATIF DAN RESPONSIF

10. *Analisis Pemasaran dan Branding Produk Makanan Jambi Menjadi Produk Makanan Nasional, adapun saran/rekomendasi hasil penelitian :*

- a. Promosi untuk makanan dan makanan ringan khas Jambi harus melibatkan sopir taxi online, biro perjalanan sebagai pintu gerbang utama untuk menyebarkan informasi makanan khas Jambi kepada tamu / wisatawan.
- b. Kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui OPD terkait mengakomodir Sopir taxi dan biro-biro perjalanan untuk dapat melakukan kegiatan promosi yang bekerjasama dengan pelaku usaha.
- c. Kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui OPD terkait: (1) meminta hotel-hotel turut memperkenalkan makanan khas Jambi melalui hidangan yang disajikan dengan menyediakan space khusus untuk makanan khas Jambi. (2) Melakukan pestival makanan tradisional untuk memperkenalkan berbagai keunikan makanan khas Jambi yang disesuaikan dengan event-event hari-hari istimewa yang sifatnya banyak mendatangkan pengunjung. (3) Makanan khas Jambi disediakan sebagai menu makanan pada acara-acara kedinasan.

- d. Untuk memudahkan penyebaran informasi tentang makanan dan makanan ringan Khas Jambi, Dinas Pariwisata perlu membuat buku informasi (buku Pintar) yang berisikan tentang makanan khas Jambi dan lokasi penjualan makanan tersebut yang diberikan kepada hotel-hotel, supir taxi online dan biro perjalanan.
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu memberi edukasi kepada pelaku usaha tentang aplikasi IT sehingga pelaku usaha memiliki kemampuan menyebarkan informasi produk dan membuat lokasi di media on line.
- f. Konsumen yang semakin cerdas dalam memilih oleh-oleh yang layak untuk dikonsumsi, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku IKM makanan untuk mencantumkan batas expire suatu produk, menggunakan label halal dan membuat proses pengolahan produk sesuai dengan standar (terstandar).
- g. Pelaku usaha melakukan inovasi kemasan dibawah pembinaan Dinas Perindustrian dan Pedagangan sehingga untuk kue basah dan kuliner dapat dibawa sebagai oleh-oleh / buah tangan.
- h. Membangun sinergisitas antar Dinas perindag, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pariwisata dalam upaya meningkatkan pemasaran dan *branding* makanan Jambi menjadi makanan nasional. Untuk itu perlu duduk bersama, membahas dan meninjau kembali tupoksi dalam usaha meningkatkan pemasaran dan branding dengan melakukan pemetaan kegiatan mengenai program yang hendak dicapai mulai dari proses pengenalan produk yang menyangkut mutu dari atribut produk dan kemampuan kapasitas SDM IKM sampai kepada proses dan hilirisasi (pemasaran).
- i. Kota Jambi belum memiliki pusat centra makanan dan makanan ringan khas Jambi, untuk perlu dibuat pusat centra makanan berupa gerai terpadu untuk memudahkan tamu mencari lokasi pusat oleh-oleh Jambi salah rekomendasi yang representatif adalah bekas angso duo, daerah gentel arasy, dan dekranasda.
- j. Perlu dibuat Peraturan Gubernur yang menjelaskan bahwa hotel-hotel di Kota Jambi hendaknya menyajikan menu makanan khas Jambi baik dari jenis kue-kue maupun jenis kuliner menggambarkan khas Jambi.

PENELITIAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

11. *Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Jambi, adapun saran/rekomendasi hasil penelitian :*
 - a. Mempersiapkan dan menempatkan SDM bidang Teknologi informatikan pada OPD-OPD terkhusus Pelayanan bagi masyarakat.
 - b. Memberikan reward dan punishment terhadap OPD yang telah memanfaatkan Teknologi informatika.
 - c. Mengevaluasi keberadaan TUPOKSI organisasi perangkat daerah bidang informatika yang tumpang tindih
 - d. Membuat komitmen bersama antar kepala daerah dan instansi terkait pemanfaatan TIK.
 - e. Menambah alokasi anggaran untuk pembangunan insfratraktur teknologi informatika.
 - f. Menerbitkan regulasi baik dalam bentuk Perda/perkada/edaran terkait kewajiban menggunakan teknologi informatika baik online maupun offline dalam proses administrasi perkantoran.

- g. Memanfaatkan Lembaga pendidikan berbasis teknologi informatika untuk meningkatkan kemampuan aparatur sebagai operator komputer.
 - h. Membuka akses dengan memanfaatkan ketersediaan infrastruktur di unit kerja untuk menyampaikan informasi berkala kepada masyarakat yang telah familiar dengan teknologi.
 - i. Memanfaatkan dan berkolaborasi dengan tenaga ahli diluar pemerintahan untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis TIK.
 - j. Memperkuat regulasi daerah dibidang TIK dengan memanfaatkan akses regulasi yang tersedia seperti Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018.
12. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Model Penerimaan Teknologi Aplikasi SISKEUDES di Provinsi Jambi), adapun saran/rekomendasi hasil penelitian :*
- a. Dibutuhkan upaya dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk memacu perangkat desa agar mampu menggunakan aplikasi Siskeudes melalui Diklat maupun Bimtek.
 - b. Dari sisi modul aplikasi Siskeudes, BPKP perlu untuk mengembangkan lebih lanjut aspek kemudahan dan kegunaannya agar bisa membantu perangkat desa membuat laporan keuangan dari berbagai sumber (APBN, APBD, sumber lain) yang terintegrasi satu aplikasi untuk multifungsi.
 - c. Untuk memperluas cakupan area sinyal internet dibutuhkan dukungan Pemda untuk memudahkan pihak provider membangun tower melalui upaya menjamin keamanan atas perangkat di lokasi serta adanya arus listrik yang stabil.
 - d. Pemerintah Pusat dan Pemda perlu melakukan evaluasi dan sinkronisasi peraturan terkait dengan keuangan desa.
13. *Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Raden Mattaher Jambi dan RSUD H. Hanafie Muaro Jambi, adapun saran/rekomendasi hasil penelitian :*
- a. Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten Bungo, diharapkan mendukung penuh upaya pengembangan SIMRS di RSUD Raden Mattaher Jambi dan RSUD H. Hanafie Bungo terutama dalam bentuk dukungan anggaran, pemenuhan kebutuhan tenaga programer, serta fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan. Organisasi perangkat daerah yang terkait antara lain: Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Diklat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Keuangan Daerah.
 - b. RSUD Raden Mattaher Jambi agar memprioritaskan upaya untuk memperkuat kultur perilaku melayani bagi pegawai RS agar lebih bisa menunjukkan sikap simpatik dan kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan bagi pasien. Mengingat kultur melayani adalah faktor humanistik yang penting dalam pengembangan SIMRS, di samping dukungan struktural yang memadai.
 - c. RSUD H. Hanafie Bungo agar memprioritaskan peningkatan kualitas bukti fisik pelayanan, seperti peralatan teknologi informasi sehingga penyediaan informasi kepada pasien lebih mudah dimengerti dan lebih menarik.

BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

14. *Strategi Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Dalam Menghadapi Bonus Demografi di Provinsi Jambi, adapun saran/rekomendasi hasil penelitian :*
 - a. Dinas tenaga kerja dan instansi terkait, mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, terutama dalam pemanfaatan sumberdaya lokal.
 - b. Dinas Pendidikan, untuk mendirikan sekolah berbasis pendidikan vokasi sesuai dengan potensi lokal.
 - c. Dinas Penanaman Modal, mengoptimalkan peningkatan kapasitas/keterampilan dalam permodalan bagi masyarakat, dengan melirik potensi investasi yang bisa dikembangkan oleh daerah.
 - d. Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, mengoptimalkan pengembangan agribisnis dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok UMKM.
 - e. Perbankan, mengoptimalkan program sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mempersiapkan masa depan melalui simpanan/tabungan oleh perbankan sampai ke masyarakat lapisan bawah.
 - f. Dinas sosial, kependudukan dan Catatan Sipil, mengoptimalkan pendataan masyarakat terkait dengan distribusi bantuan agar tepat sasaran.
 - g. Lembaga adat, mengoptimalkan peran lembaga adat dalam memperbaiki perilaku dan budaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

15. *Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Lanjut Usia di Provinsi Jambi, adapun saran/rekomendasi hasil penelitian :*
 - a. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Balitbangda dan Dinas Sosial perlu membuat basis data yang komprehensif tentang jumlah, kondisi sosial, latar belakang serta riwayat kesehatan lansia di Provinsi Jambi.
 - b. Balitbangda, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan perlu membuat rencana induk untuk penanganan lansia di masa mendatang dengan berdasarkan basis data dan kondisi yang ideal bagi lansia di Provinsi Jambi.
 - c. Dinas Sosial diharapkan segera membuat Perda mengenai perlindungan dan pemberdayaan lansia di Provinsi Jambi.
 - d. Dinas sosial diharapkan untuk lebih gencar memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang bagaimana merawat dan memberi perlindungan bagi lansia serta mendorong lebih banyak lagi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menjadi mitra pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap lansia.
 - e. Dinas sosial dapat merujuk model pemberdayaan lansia yang dilakukan oleh LKS yang berbasiskan religi seperti yang ada di Kabupaten Merangin (Ponpes Syeh Maulana Qori), Kabupaten Tebo (Ponpes Nurul Jalal, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Yayasan Sumber Pendidikan dan Mental Agama Allah di Rantau Makmur).

16. *Pengembangan SMK Berbasis Potensi Unggulan Daerah di Provinsi Jambi, adapun saran/rekomendasi hasil penelitian :*
 - a. Gubernur Provinsi Jambi beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (Dinas Pendidikan, BAPPEDA dan Dinas Tenaga Kerja) menerjemahkan Inpres No. 9 Tahun 2016 menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Revitalisasi SMK. Melalui Perda tersebut dapat dirumuskan Pola dan Program-program revitalisasi SMK di tingkat daerah.

- b. Dalam rangka pemenuhan guru produktif dapat dilakukan melalui program keahlian ganda. Langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu dengan menentukan *roadmap* kebutuhan guru produktif di tiap Kabupaten/Kota dan penentuan model pemenuhan kuantitas guru produktif SMK baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
- c. Dalam mengatasi kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) dengan kompetensi yang diajarkan di SMK serta dalam rangka meningkatkan relevansi kompetensi keahlian guru produktif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), SMK harus mengirimkan peserta didiknya melalui program praktik kerja industri (prakerin) ke DU/DI, kemudian juga memberikan kesempatan bagi guru bidang studi keahlian di SMK untuk magang di DU/DI yang relevan dengan kompetensi yang diajarkan atau mendatangkan staf ahli sebagai guru tamu dari DU/DI yang ada.
- d. Penatan Kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK serta pengembangan SMK unggulan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Setiap Kabupaten/Kota memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda dan keunikan karakteristik tersendiri. Oleh karena itu program keahlian pada pendidikan SMK hendaknya disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah dan diarahkan menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif dan mampu mendayagunakan potensi perekonomian daerah, Kesesuaian antara dunia pendidikan dan potensi unggulan daerah akan berdampak pada optimalisasi pengelolaan sumber daya yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- e. SMK sebagai penyedia tenaga kerja terdidik dan terampil tidak hanya harus memenuhi kebutuhan secara kuantitatif, yang perlu diperhatikan adalah jenis-jenis bidang keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) yang ada di daerah. Kesesuaian bidang keahlian ini hendaknya menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di SMK.
- f. Sinergitas dan kerjasama dengan instansi terkait, dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). Mendorong terciptanya komitmen masing-masing *stackholder* untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan SMK berbasis potensi daerah, dalam penentuan bidang keahlian yang akan dikembangkan, penyusunan kurikulum, sharing pembiayaan pembangunan dan kerjasama dalam penyediaan sarana dan prasana selama proses pembelajaran.

BIDANG EKONOMI

17. *Pengembangan dan Pengelolaan Jalan Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Jambi, adapun Saran/Rekomendasi hasil penelitian :*
 - a. Dinas yang menangani fungsi pertanian pangan/hortikultura dan perkebunan disarankan melakukan penilaian proposal jalan pertanian dengan mempertimbangkan empat kriteria dan pembobotan masing-masing (Lokasi, Kelompok Tani, Kualifikasi Kebun/Sawah dan Sharing Perawatan Jalan) sebagai dasar untuk penentuan calon lokasi pembangunan pertanian.
 - b. Perencanaan jalan pertanian harus mempertimbangkan konektivitas antarjalan yang ada dengan jalan pertanian yang akan dibangun guna optimalisasi transportasi input dan output pertanian serta efisiensi dana pemerintah.
 - c. Dana desa dapat dimanfaatkan untuk membangun jalan pertanian. Pemerintah Desa disarankan berkoordinasi dengan dinas yang menangani fungsi pertanian pangan/hortikultura dan perkebunan terkait juknis/juklak serta model jalan dan

skema pengerjaan yang tepat (swakelola oleh kelompok tani atau menggunakan jasa pihak ketiga).

- d. Dinas/OPD yang menangani fungsi pertanian pangan/hortikultura dan perkebunan disarankan menyosialisasikan peluang sumber dana dari APBN melalui e-proposal kepada kelompok tani dan berkoordinasi dengan OPD yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa tentang peluang pemanfaatan Dana Desa untuk membangun jalan pertanian.
- e. Aturan yang mengikat tentang sharing perawatan jalan pertanian disarankan menjadi bagian dari berita acara atau kontrak kerjasama dengan petani, masyarakat setempat (yang lokasinya terpilih untuk pembangunan jalan pertanian) ataupun pihak swasta yang ikut memanfaatkan jalan pertanian tersebut. Hal ini guna menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap pemeliharaan jalan pertanian yang bersumber dari dana pemerintah.
- f. Masyarakat tani juga bisa mengajukan proposal untuk memanfaatkan alternatif peluang dana *Corporate Sosial Responsisibility* (CSR) dari perusahaan swasta maupun BUMN untuk pemeliharaan maupun pembangunan Jalan Pertanian.
- g. JP sangat dibutuhkan oleh petani untuk kelancaran pengangkutan input dan output produksi pertanian. Untuk itu Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota disarankan agar meningkatkan anggaran untuk pembangunan JP dengan skala prioritas berdasarkan penilaian kriteria calon petani dan calon lokasi pembangunan JP. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa keberadaan Jalan Pertanian dapat meningkatkan perekonomian dan kehidupan sosial petani secara signifikan, sedangkan dampak buruk yang ditimbulkan dari pembangunan JP tidak perlu dikhawatirkan selama partisipasi masyarakat masih baik.
- h. Pembangunan jalan usahatani lebih diprioritaskan pada kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sekaligus untuk mendorong meluasnya kawasan LP2B di Provinsi Jambi.
- i. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan peningkatan jalan pertanian dari konstruksi tanah menjadi pengerasan jalan atau pembetonan untuk jalan pertanian yang telah dimanfaatkan cukup lama dan terawat dengan baik sebagai reward/penghargaan bagi kelompok tani/masyarakat setempat.
- j. Pemerintah Kabupaten/Kota agar memperketat regulasi yang melarang alih fungsi lahan pertanian di kawasan yang telah didanai pembangunan jalan pertaniannya.
- k. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan jalan pertanian agar berkelanjutan di Provinsi Jambi disarankan kepada kelompok tani hal berikut ini:
 - Menjadikan kegiatan gotong royong termasuk sumbangan dana perawatan jalan sebagai rencana kerja kelompok tani.
 - Membuat aturan tertulis terkait hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam pemanfaatan jalan pertanian sehingga terawat dengan baik.
 - Dalam skema pembangunan jalan pertanian secara kontraktual agar memprioritaskan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja.
 - Mempromosikan pemanfaatan jalan pertanian untuk tujuan wisata dan olahraga sesuai dengan kreativitas kelompok dan mengangkat kearifan lokal masyarakat setempat.

18. *Pengendalian Aktifitas PETI dan Pengembangan Inovasi Penataan Lahan Eks PETI, adapun Saran/Rekomendasi hasil penelitian :*

- a. Penataan lahan bekas tambang disesuaikan dengan fungsi awal lahan dan keinginan pemilik lahan. Jenis tanaman yang ditanam pada lahan yang telah di reklamasi bekas PETI adalah tanaman yang memiliki cepat produksi dan tanaman tumpang sari sehingga masyarakat cepat mendapatkan hasil dari budidaya pertanian atau perkebunan.
- b. Pihak Dinas LH Kabupaten diharapkan dapat melakukan pemantauan kualitas air sungai dengan sumber atau titik pengambilan sampel air yang berdekatan dengan lokasi, serta sediaan sedimen di dasar sungai pada lokasi tambang.
- c. Dinas kesehatan Kabupaten diharapkan dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam melakukan penyuluhan tentang dampak penambangan tanpa izin bagi kesehatan masyarakat.
- d. Adanya regulasi ditingkat Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam bentuk peraturan yang melindungi lahan agar tidak terjadi konversi penggunaan lain, selain sesuai dengan peruntukannya (pertanian dan perkebunan). Serta adanya sanksi bagi warga yang melakukan perubahan atau kerusakan fungsi lahan dan lingkungan.
- e. Pemerintah daerah, beserta *stakeholders* dan masyarakat serta swasta perlu menyiapkan program pemberdayaan masyarakat pasca PETI dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal di bidang pertanian, perkebunan, peningkatan keterampilan bagi peningkatan penghasilan masyarakat (*empowerment*), diversifikasi mata pencaharian, mengendalikan harga komoditi hasil pertanian dan perkebunan (karet dan sawit) atau pemberian subsidi. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan anggaran dana desa untuk pembangunan desa dan membantu menyediakan bibit, pupuk, ternak, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa.
- f. Untuk pengendalian aktivitas penambangan tanpa izin (emas), disarankan untuk melakukan kebijakan terkait dengan :
 - Kerjasama untuk kesepakatan alih fungsi lahan bekas pertambangan emas ilegal;
 - Mengawal tumbuhnya ekonomi dan lapangan usaha baru bekas pertambangan emas ilegal;
 - Menetapkan kriteria pertambangan emas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- g. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait konsisten dalam pengembangan lahan setelah pasca tambang baik melalui pengembalian fungsi lahan dan penyiapan pertumbuhan kegiatan perekonomian rakyat. Hal ini sebagai langkah proses transformasi aktivitas penambangan yang ilegal menuju aktivitas masyarakat yang lebih produktif secara berkelanjutan.

Langkah kebijakan strategis yang disarankan:

 - Tersedianya program dan dana pemberdayaan masyarakat terutama untuk mendorong kegiatan ekonomi lokal.
 - Tersedianya regulasi tentang kriteria pertumbuhan ekonomi lokal disekitar wilayah bekas tambang ilegal (PETI).
- h. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Pembinaan, dan Pengawasan usaha pertambangan sebagai implementasi kegiatan tambang rakyat yang dilakukan secara turun-temurun, jika dengan tambang rakyat tradisional hanya menggunakan peralatan tradisional, tanpa menggunakan alat berat dan tanpa menggunakan bahan kimia.

- i. Pemerintah Provinsi Jambi agar membuat peraturan daerah (PERDA) tentang Pertambangan Rakyat. WPR bertujuan mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan dampak negatif dari keberadaan tambang ilegal. Sehingga kerusakan lingkungan ke depan dapat diminimalisir. Sekaligus dalam upaya menerapkan isi dari Pasal 66 Undang-Undang No-4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur tentang Pertambangan Rakyat. Dalam pemberian izin bagi penambang, kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus memperhatikan keberadaan tanah-tanah ulayat (adat) agar kebijakan perizinan yang dilakukan di wilayah pertambangan tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat adat.
 - j. Dinas LH Kabupaten, BPOM Provinsi Jambi dan Dinas Ketahanan Pangan perlu melakukan pengecekan terhadap hasil budidaya perikanan dilokasi areal bekas aktivitas PETI baik pada budidaya menggunakan kolam maupun pada daerah aliran sungai dan melakukan uji kandungan kimiawi pada produk hasil pertanian (padi) agar hasil produksi tersebut memberikan rasa aman dan layak konsumsi bagi masyarakat.
19. *Model Inovasi Produk Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Melalui Pendekatan Community Based Tourism di Provinsi Jambi, adapun Saran/Rekomendasi hasil penelitian :*
- a. Pengembangan akses dan pengembangan yang berkaitan dengan atraksi wisata serta karakteristik wisata dan dampak lingkungannya, harus menjadi perhatian pemerintah melalui pengembangan investasi yang berbasis kearifan lokal dengan melibatkan masyarakat. Investasi ini bersifat *demand side* atau dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
 - b. Pemerintah Kabupaten dan Kota disarankan mendorong pertumbuhan desa wisata yang baru sebanyak mungkin, yang disesuaikan dengan potensi budaya dan kearifan lokal masing-masing dan menjadikannya sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
 - c. Desa wisata yang telah mapan (siap menerima pengunjung) agar dipasarkan secara bersamaan dengan merancang sebuah paket wisata dengan titik singgah pada tiga atau lebih desa wisata sehingga pengalaman yang diperoleh oleh wisatawan jadi lebih kaya dan terdapat efisiensi biaya perjalanan wisatawan.
 - d. Guna mengakselerasi pertumbuhan desa wisata di Provinsi Jambi, maka Balitbangda Provinsi Jambi bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi disarankan membentuk Kelompok Kerja Rintisan Desa Wisata yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, Masyarakat, dan Aktor Pariwisata lainnya.
 - e. Pemerintah Desa Jernih Jaya Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci disarankan mengklarifikasi status lahan Rawa Bento sebagai objek andalannya yang berada di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Hal ini tentu saja untuk menghindari konflik lingkungan terkait dengan pengembangan desa wisata.
 - f. Pendapatan masyarakat pada penelitian ini menjadi variabel output yang utama, maka perlu diperhatikan skema peningkatan pendapatan masyarakat yang berkelanjutan misalnya melalui pengembangan koperasi dan kelembagaan desa seperti BUMDES atau peningkatan tabungan masyarakat desa dari hasil pariwisata. Pada konteks ini, pengelolaan desa wisata disarankan terintegrasi dengan BUMDes. Sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh terkumpul di satu lembaga dan selanjutnya didistribusikan kepada semua warga desa, sekaligus menghindari potensi perpecahan/konflik antar warga akibat saling berebut manfaat dari kunjungan wisatawan.

- g. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota disarankan untuk memfasilitasi dalam Pembangunan infrastruktur penunjang desa wisata. Sedangkan pemerintah desa sebaiknya didorong memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan desa wisata dan menyinergikan dengan BUMDes di wilayah masing-masing.
- h. Dari hasil MACTOR menunjukkan bahwa konvergensi antar aktor pemerintah menjadi salah satu kunci dalam pengembangan pariwisata. Disarankan sinergi kelembagaan dengan memberikan kewenangan kepada suatu lembaga yang berwenang dalam mengelola wisata melalui skema regulasi (peraturan daerah atau desa) yang lebih kuat, serta memberikan insentif kepada lembaga pengelola agar bekerja sama secara berkesinambungan dalam mengelola pariwisata berbasis kearifan lokal. Disamping itu, nomenklatur OPD Pariwisata yang stratis dan tidak mencerminkan pariwisata pada nomenklatur menjadi pertimbangan untuk ditinjau. Hal ini untuk menghindari terjadinya hambatan ketika mengajukan penganggaran terkait pariwisata.
- i. Implementasi skema pengembangan wisata lokal melalui Institusi Multi Pihak (IMP) harus dilakukan melalui proses partisipatif yakni dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, dialog, permusyawatan antar pihak. Hasil sosialisasi ini kemudian harus terlebih dahulu dikukuhkan melalui regulasi (Perda Kab/Kota atau Peraturan Desa). Tahap berikutnya adalah membuat peta jalan terkait dengan pendanaan, *benefit sharing* (pembagian manfaat), *cost sharing* (berbagi risiko) dan pengelolaan yang berkelanjutan (siapa melakukan apa).
- j. Implementasi pengembangan inovasi produk harus dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan produk-produk unggulan wisata lokal yang dikaitkan dengan sisi permintaan dan penawaran. Hasil pemetaan ini kemudian dijadikan acuan untuk pengembangan inovasi produk dan inovasi *skill* melalui pelatihan, peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran, serta pemetaan distribusi rantai pasok dari produk yang akan dikembangkan. Inovasi produk ini harus disertai dengan uji pasar dan evaluasi produk secara berkala sehingga pariwisata berbasis kearifan lokal ini bersifat adaptif dan berkesinambungan.
- k. Guna menghindari dampak negatif dari pengembangan pariwisata, disarankan menerapkan konsep "Halal *tourism*". Keseluruhan konteks terkait dengan kebijakan pariwisata daerah menjadi peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai inisiator.
- l. Secara keseluruhan dan yang terpenting dalam menggiatkan sektor pariwisata di Provinsi Jambi, tentunya perlu memasukan kebijakan pengembangan pariwisata daerah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi serta visi dan misi Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

20. Indikasi Geografis (IG) Nenas Tangkit Baru Jambi

Nenas merupakan tanaman buah berupa semak yang memiliki nama ilmiah *Anenas comosus*, yang memiliki nama daerah *danas* (sunda) dan *neneh* (sumatera). Di Indonesia pada mulanya hanya sebagai tanaman pekarangan, dan meluas dikedirikan di lahan kering (tegalan) di seluruh wilayah nusantara, tanaman ini kini dipelihara di daerah tropik dan sub tropik. Dari tahun ke tahun, tanaman ini telah dikembangkan oleh masyarakat Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 1970. Kemudian oleh Menteri Pertanian dengan Nomor SK:103/kpts/TP.2004/3/2000, nenas tangkit ditetapkan termasuk komoditi golongan Queen dengan kualitas terbaik. Nenas Tangkit telah mendapat pengakuan sebagai komoditi berkualitas baik, maka selain sebagai potensi unggulan juga dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis yang perlu dilindungi oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis (IG) Nenas Tangkit Baru diusulkan atas nama *Masyarakat Penghasil Nenas Tangkit Baru Provinsi Jambi* atau disingkat dengan *MPNTB* Provinsi Jambi.

Pada prinsipnya masyarakat penghasil Nenas Tangkit Baru ini sebagai satu kesatuan yang tumbuh dengan persamaan persepsi visi dan misi dalam mempertahankan kualitas atau standar mutu Nenas Tangkit Baru. Melalui upaya perlindungan Indikasi Geografis (IG) kedepan diharapkan agar produk yang kita miliki mampu bersaing dipasaran global yang berdampak secara langsung terhadap peningkatan pendapatan petani Nenas Tangkit Baru Provinsi Jambi.

Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah, meliputi Kegiatan *Science Park* di Provinsi Jambi, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA), Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran IPTEK. Jumlah Anggaran sebesar Rp. 582.107.500.- terealisasi sebesar 98,52%

1. Pengembangan *Science Park* di Provinsi Jambi

Science Park (SP) atau *Science Tekhno Park* (STP) merupakan program Nawacita butir ke 6 (enam), SP atau STP adalah merupakan kawasan yang dikelola secara profesional yang dijabarkan secara terstruktur, terpadu terintegrasi dan berkelanjutan dalam bentuk implementasi kegiatan berbasis komoditas unggulan disuatu wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat sekitarnya dengan mempromosikan budaya inovasi teknologi dan daya saing bisnis berbasis Riset Iptek.

- Tujuan

Dalam rangka merangsang dan mengelola arus pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi, lembaga litbang dan industri yang berada di Provinsi Jambi, kemudian memfasilitasi penciptaan dan pertumbuhan perusahaan berbasis inovasi melalui inkubasi bisnis dan proses *spinoff*, dan menyediakan layanan peningkatan nilai tambah lainnya, melalui penyediaan ruang dan fasilitas berkualitas tinggi

- Kesimpulan

- Dari hasil FGD yang telah dilakukan telah diperoleh persepsi yang sama mengenai lokasi pembangunan *Science Park* Provinsi Jambi, baik dari pihak Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi lokasi pembangunan maupun Balitbangda Provinsi Jambi.
- Semua peserta FGD telah mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Jambi berkaitan dengan pembangunan *Science Park* Provinsi Jambi.
- Peserta FGD khususnya kepala Desa maupun aparat di Kecamatan dapat membantu dalam hal menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Jambi kepada masyarakat.
- Dengan adanya FGD ini diharapkan pembangunan *Science Park* Provinsi Jambi, yang dilaksanakan secara bertahap dapat berjalan sesuai dengan rencana awal.

- Saran

Dari pelaksanaan FGD yang telah dilakukan disarankan semua pihak :

- Diharapkan Balitbangda Provinsi Jambi dalam melaksanakan kegiatannya dimasa yang akan datang dapat melibatkan petani yang berada disekitar lokasi kegiatan.
- Para aparat desa diharapkan menjadi salah satu pengarah Pembangunan *Science Park* di Kecamatan Sungai Gelam.
- Diharapkan petani yang memiliki lahan yang berada disekitar lokasi dapat memberikan informasi selengkapnya lahan mereka dalam wilayah SP.

- Bagi petani yang kebetulan mempunyai tanaman yang berada didalam wilayah pembangunan SP untuk segera melakukan koordinasi dengan Balitbangda Provinsi Jambi.
2. Penguatan dan Pengembangan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)
Maksud dilaksanakannya workshop sistem inovasi daerah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengembangan sistem inovasi daerah, inovasi produk, jejaringan pemasaran, promosi dan networking. Tujuan dilaksanakan workshop adalah untuk meningkatkan kerjasama antar pemerintah, Perguruan Tinggi dan UKM serta mendorong pengembangan produk yang berdaya saing.
Workshop Sistem Inovasi Daerah mengambil tema Dengan SIDa Kita Dorong Pengembangan Produk Unggulan Daerah Yang Berdaya Saing Untuk Kesejahteraan Masyarakat.
3. Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran IPTEK
- Pelaksanaan Karya Tulis Ilmiah (KTI)
 - Pelaksanaan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)
 - Pameran Promosi IPTEK

D. Akuntabilitas Keuangan

Aspek yang dibahas pada akuntabilitas kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2018 meliputi pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan program serta akuntabilitas keuangan. Sesuai dengan Rencana Kinerja 2018, selama periode ini Balitbangda Provinsi Jambi telah merencanakan 41 Kegiatan dalam 8 Program untuk memenuhi kebijakan visi, misi, tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi Jambi. Adapun nilai capaian kinerja selama tahun 2018 menunjukkan tingkat keberhasilan Balitbangda Provinsi Jambi yakni telah berhasil melaksanakan **41 Kegiatan** dalam 8 **Program** untuk memenuhi kebijaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi yang telah ditetapkan. Sedangkan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari APBD sebesar **Rp. 4.537.069.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.385.748.382,-** atau **96,66%**.

Penjelasan mengenai tingkat pencapaian kinerja 8 (enam) program dan 41 kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dijelaskan sebagai berikut :

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 808.472.439,- atau sebesar 97,55% dari Rp. 828.784.300,-. Realisasi fisik tercapai sebesar 97,55%. Rincian capaian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut.
- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 34.700.000,- terealisasi Rp. 34.606.500,- atau 99,73% dan terdapat sisa dana Rp. 93.500,- (0,27%). Target keluaran (*output*) berupa jumlah surat keluar yang dikelola selama 1 tahun. Tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,73%.
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 141.550.000,- terealisasi Rp. 128.313.178,- atau 90,65% dan terdapat sisa dana Rp. 13.236.822,- (9,35%). Target keluaran (*output*) berupa langganan telepon, air, dan listrik selama 12 bulan tercapai sesuai target yang ditetapkan selama 12 bulan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 90,65%.
 - c) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.82.330.000,- terealisasi Rp.77.898.000,- atau 94,62% dan terdapat sisa dana Rp.4.432.000,- (5,38%). Target keluaran (*output*) berupa pembayaran jasa administrasi keuangan selama 12 bulan sebanyak 17 orang tercapai sesuai target

yang ditetapkan selama 12 bulan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 94,62%.

- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 101.053.800,- terealisasi Rp. 100.800.000,- atau 99,75% dan terdapat sisa dana Rp. 253.800,- (0,25%). Target keluaran (*output*) berupa pembayaran jasa kebersihan kantor selama 12 bulan tercapai sesuai target yang ditetapkan selama 12 bulan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 99,75%.
 - e) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 71.478.000,- terealisasi Rp. 71.478.000,- atau 100%. Target keluaran (*output*) berupa 1 paket sebanyak 51 jenis pengadaan ATK selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 100%.
 - f) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 27.528.400,- terealisasi Rp. 27.528.400,- atau 100%. Target keluaran (*output*) berupa 1 paket sebanyak 7 jenis penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 100%.
 - g) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 4.304.100,- terealisasi Rp. 4.304.100,- atau 100%. Target keluaran (*output*) berupa penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 9 jenis selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 100%.
 - h) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 6.840.000,- terealisasi Rp. 6.837.000,- atau 99,96% dan terdapat sisa dana Rp. 3.000,- (0,04%). Target keluaran (*output*) berupa langganan surat kabar selama 12 bulan dan buku Peraturan Perundang-undangan tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,96%.
 - i) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi Rp. 24.900.000,- atau 99,84%. Target keluaran (*output*) berupa penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan dapat tercapai dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,84%.
 - j) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 334.000.000,- terealisasi Rp. 331.747.261,- atau 99,33% dan terdapat dana sisa sebesar Rp. 2.252.739,- (0,67%). Target keluaran (*output*) berupa pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah selama 12 bulan dapat tercapai dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 99,33%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 7 (kegiatan) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 420.154.457,- atau sebesar 96,86% dari Rp. 433.780.000,-. Realisasi kinerja fisik tercapai sebesar 96,86 %. Rincian capaian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 9.762.850,- terealisasi Rp. 9.681.000,- atau 99,16% dan terdapat sisa dana Rp. 81.850,- (0,84%). Target keluaran (*output*) berupa 1 paket pengadaan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,16%.
 - b) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 77.037.150,- terealisasi Rp. 75.783.135,- atau 98,37% dan terdapat sisa dana Rp. 1.254.015,- (1,63%). Target keluaran (*output*) berupa 1 paket pengadaan

- peralatan gedung kantor selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 98,37%.
- c) Kegiatan Mebeleur. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 8.000.000,- terealisasi Rp. 8.000.000,- atau 100%. Target keluaran (*output*) berupa 1 paket pengadaan mebeleur tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 98,37%.
 - d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 56.400.000,- terealisasi Rp. 56.250.000,- atau 99,73% dan terdapat sisa dana Rp. 150.000,- (0,27%). Target keluaran (*output*) berupa biaya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 1 (satu) unit gedung selama 1 tahun tercapai dan sesuai target, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,73%.
 - e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 262.580.000,- terealisasi Rp. 250.505.322,- atau 95,40% dan terdapat sisa dana Rp.12.074.678,- (4,60%). Target keluaran (*output*) berupa biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 95,40%.
 - f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 9.935.000,- atau 99,35% dan terdapat sisa dana Rp. 65.000,- (0,65%). Target keluaran (*output*) berupa biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,35%.
 - g) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Listrik dan Elektronik. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 10.000.000,- atau 100%. Target keluaran (*output*) berupa biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik selama 1 tahun tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 100%.
- 3) **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 45.000.000,- atau sebesar 99,17% dari Rp. 45.000.000,- Kegiatan dalam program ini adalah Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Target keluaran (*output*) berupa pengadaan pakaian batik Jambi sebanyak 75 steel tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,17%.
- 4) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 48.085.055,- atau sebesar 97,95% dari Rp. 49.090.000,-. Kegiatan dalam program ini adalah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Target keluaran (*output*) berupa jumlah PNS Litbangda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebanyak 3 (tiga) orang tercapai dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 97,95%.
- 5) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 11.650.000,- atau sebesar 64,43% dari Rp. 18.081.000,-. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.431.000,- (35,57%) hal ini dikarenakan honorarium untuk petugas TEPR dan LPPK tidak boleh dibayarkan lagi. Kegiatan dalam program ini adalah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Realisasi Kinerja Keuangan OPD. Target keluaran (*output*) berupa dokumen laporan-laporan terkait capaian dan realisasi

kinerja Balitbangda Provinsi Jambi tercapai sesuai target yang ditetapkan sebanyak, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik berhasil mencapai 64,43%.

- 6) Program Penelitian dan Pengembangan,** terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.673.985.148,- atau sebesar 96,40% dari Rp. 1.736.490.750,-. Realisasi kinerja fisik tercapai sebesar 96,40%. Rincian capaian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Kegiatan Penelitian Mandiri. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 109.281.500,- terealisasi Rp. 94.943.000,- atau 86,88% dan terdapat sisa dana Rp. 14.338.500,- (13,12%). Target keluaran (*output*) berupa 10 rekomendasi hasil penelitian mandiri yang dilakukan fungsional peneliti Balitbangda Provinsi Jambi. Target yang tercapai sebanyak 9 rekomendasi hasil penelitian mandiri, hal ini disebabkan 1 (satu) orang fungsional peneliti sedang melanjutkan pendidikan doktor, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 86,88%.
 - b) Kegiatan Penelitian Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsif. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 83.306.750,- terealisasi Rp. 82.105.000,- atau 98,56% dan terdapat sisa dana Rp. 1.201.750,- (1,44%). Target keluaran (*output*) berupa 1 rekomendasi hasil penelitian Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsif dengan judul *Analisis Pemasaran dan Branding Produk Makanan Jambi Menjadi Produk Makanan Nasional*, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 98,56%.
 - c) Kegiatan Penelitian Subbid Data dan Pengkajian Peraturan. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 139.495.000,- terealisasi Rp. 126.727.800,- atau 90,85% dan terdapat sisa dana Rp. 12.767.200,- (9,15%). Target keluaran (*output*) berupa 1 rekomendasi hasil penelitian dengan judul *Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Jambi*, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 90,85%.
 - d) Kegiatan Penelitian Subbid Pemerintahan Desa. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 165.797.500,- terealisasi Rp. 155.197.500,- atau 93,61% dan terdapat sisa dana Rp. 10.600.000,- (6,39%). Target keluaran (*output*) berupa 1 rekomendasi hasil penelitian dengan judul *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Model Penerimaan Teknologi Aplikasi SISKEUDES di Provinsi Jambi)*, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 93,61%.
 - e) Kegiatan Penelitian Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 138.625.000,- terealisasi Rp. 125.871.800,- atau 90,80% dan terdapat sisa dana Rp. 12.753.200,- (9,20%). Target keluaran (*output*) berupa 1 rekomendasi hasil penelitian dengan judul *Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Raden Mattaher Jambi dan RSUD H. Hanafie Muaro Jambi*, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 90,80%.
 - f) Kegiatan Penelitian Subbid Ekonomi. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 185.657.500,- terealisasi Rp. 183.849.500,- atau 99,03% dan terdapat sisa dana Rp. 1.808.000,- (0,97%). Target keluaran (*output*) berupa 1 rekomendasi hasil penelitian dengan judul *Model Inovasi Produk Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Melalui Pendekatan Community Based Tourism di Provinsi Jambi*, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,03%.
 - g) Kegiatan Penelitian Subbid SDA dan Lingkungan Hidup. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 192.493.500,- terealisasi Rp. 191.755.098,- atau 99,62% dan terdapat sisa dana Rp. 738.402,- (0,38%). Target keluaran (*output*) berupa 1 rekomendasi hasil penelitian dengan judul *Pengendalian Aktifitas PETI dan Pengembangan*

Inovasi Penataan Lahan Eks PETI, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,62%.

- h) Kegiatan Penelitian Subbid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasaranan. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 196.717.000,- terealisasi Rp. 195.022.800- atau 99,14% dan terdapat sisa dana Rp. 1.694.200,- (0,86%). Target keluaran (*output*) berupa 1 rekomendasi hasil penelitian dengan judul *Pengembangan dan Pengelolaan Jalan Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Jambi*, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,14%.
 - i) Kegiatan Penelitian Subbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 74.672.000,- terealisasi Rp. 74.254.500- atau 99,44% dan terdapat sisa dana Rp. 417.500,- (0,56%). Target keluaran (*output*) berupa 1 rekomendasi hasil penelitian dengan judul *Indikasi Geografis (IG) Nenas Tangkit Baru Jambi*, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,44%.
 - j) Kegiatan Penelitian Subbid Sosial dan Budaya. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 147.195.000,- terealisasi Rp. 143.884.500- atau 97,75% dan terdapat sisa dana Rp. 3.310.500,- (2,25%). Target keluaran (*output*) berupa 1 rekomendasi hasil penelitian dengan judul *Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Lanjut Usia di Provinsi Jambi*, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 97,75%.
 - k) Kegiatan Penelitian Subbid Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 141.895.000,- terealisasi Rp. 140.586.200- atau 99,08% dan terdapat sisa dana Rp. 1.308.800,- (0,92%). Target keluaran (*output*) berupa 1 rekomendasi hasil penelitian dengan judul *Strategi Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Dalam Menghadapi Bonus Demografi di Provinsi Jambi*, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,08%.
 - l) Kegiatan Penelitian Subbid Kependudukan. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 161.355.000,- terealisasi Rp. 159.787.450- atau 99,03% dan terdapat sisa dana Rp. 1.567.550,- (0,97%). Target keluaran (*output*) berupa 1 rekomendasi hasil penelitian dengan judul *Pengembangan SMK Berbasis Potensi Unggulan Daerah di Provinsi Jambi*, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,03%.
- 7) Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan**, terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 805.268.109,- atau sebesar 95,44% dari Rp. 843.735.450,-. Realisasi kinerja fisik tercapai sebesar 95,44 %. Rincian capaian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil-hasil Kinerja Litbang. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 81.200.000,- terealisasi Rp. 79.511.280,- atau 97,92% dan terdapat sisa dana Rp. 1.688.720,- (2,08%). Target keluaran (*output*) berupa Laporan Monev sebanyak 15 Laporan, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 97,92%.
 - b) Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 279.732.300,- terealisasi Rp. 259.653.688,- atau 92,82% dan terdapat sisa dana Rp. 20.078.612,- (7,18%). Target keluaran (*output*) berupa Ekspose DRD sebanyak 2 kali, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 92,82%.
 - c) Kegiatan Rakor dan Forum Kelitbang. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 196.061.800,- terealisasi Rp. 194.785.750,- atau 99,35% dan terdapat sisa dana Rp. 1.276.050,- (0,65%). Target keluaran (*output*) berupa Rakor 1 kali dan Forum OPD 1 kali, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,35%.
 - d) Kegiatan Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit). Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 89.200.000,- terealisasi Rp. 74.526.060,- atau 83,55% dan terdapat sisa dana Rp.

- 14.673.940,- (16,45%). Target keluaran (*output*) berupa MoU sebanyak 1 MoU, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 82,55%.
- e) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Peneliti. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 111.110.750,- terealisasi Rp. 110.591.231,- atau 99,53% dan terdapat sisa dana Rp. 519.519,- (0,47%). Target keluaran (*output*) berupa Peneliti yang mengikuti Bimtek sebanyak 70 orang, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,53%.
 - f) Kegiatan Penerbitan Jurnal Litbang. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 86.430.600,- terealisasi Rp. 86.200.100,- atau 99,73% dan terdapat sisa dana Rp. 230.500,- (0,27%). Target keluaran (*output*) berupa Jurnal yang terbit sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,73%.
- 8) Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 573.508.174,- atau sebesar 98,53% dari Rp. 582.107.500,-. Realisasi kinerja fisik tercapai sebesar 98,53 %. Rincian capaian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Kegiatan Science Park di Provinsi Jambi. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 198.406.000,- terealisasi Rp. 197.828.974,- atau 99,71% dan terdapat sisa dana Rp.577.026,- (0,29%). Target keluaran (*output*) berupa Pemasangan Patok dan Papan Merk sebanyak 1 buah, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 99,71%.
 - b) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 136.099.500,- terealisasi Rp. 133.527.200,- atau 98,11% dan terdapat sisa dana Rp. 2.572.300,- (1,89%). Target keluaran (*output*) berupa 1 produk unggulan daerah, sehingga tingkat pencapaian/kinerja fisik mencapai 98,11%.
 - c) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran IPTEK. Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 247.602.000,- terealisasi Rp. 242.152.000,- atau 97,80% dan terdapat sisa dana Rp. 5.450.000,- (2,20%).

BAB IV PENUTUP

A. Capaian Keberhasilan di Bidang Penelitian

Keberhasilan di bidang Litbang dan Inovasi yang amat menonjol selama periode 2018 adalah :

1. Penghargaan Balitbangda dari Kemenristekdikti Tahun 2018.

Keberhasilan dibidang Litbang dan Inovasi yang menonjol selama periode 2018 adalah Mendapat Anugerah sebagai Balitbangda Berkinerja Utama dalam Penguatan SIDA yang ke empat kali dari Kemenristekdikti pada tanggal 13 Desember 2018 di Jakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut, Balitbangda melakukan inovasi birokrasi dan tata kerja, terutama dengan mensinergikan kerja intern dan ektern, kerjasama antar bidang dalam Balitbangda dan kerjasama dengan sejumlah OPD, Lemlit UNJA, BPTP, BI dan sejumlah lembaga penelitian baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Kabupaten/kota, serta kerjasama dengan pengusaha dan masyarakat, dengan mengedapankan konsep *Academy Businessment dan Government (ABG)*.



Gambar 1. Penyerahan Anugerah Balitbangda Berkinerja Utama oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti RI Ir. Patdono Siwignjo, M.Eng, Sc. Ph.D. kepada Kepala Balitbangda Provinsi Jambi Ir. Azrin, M.Si.



Gambar 2. Foto bersama Penyerahan Anugerah Balitbangda Berkinerja Utama di BSD Tangerang (Ir. Azrin, M.Si. No. 3 dari kiri dan Prof. Asapri Jaya Bakri Walikota Sungai Penuh No. 4 dari kiri)



Gambar 3. Sertifikat Balitbangda Provinsi Jambi sebagai Balitbangda Provinsi Berkinerja Utama dalam Penguatan SIDA Tahun 2018

2. Kerjasama dengan INSTIPER Yogyakarta dalam Pembangunan Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan di Provinsi Jambi

Adapun ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- Kegiatan Pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi di bidang pembangunan perkebunan, pertanian dan kehutanan berbasis potensi unggulan daerah di Provinsi Jambi.
- Sinergi Pemberdayaan Masyarakat dalam pendampingan di bidang pembangunan perkebunan, pertanian dan kehutanan berbasis hasil penelitian, pengembangan, penerapan Ilmu pengetahuan Teknolkgi dan Inovasi.
- Kegiatan tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan, potensi dan sumberdaya yang ada (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Koperasi, Pendidikan, Perencanaan dan Penerapan IPTEKIN) secara optimal serta berkesinambungan guna percepatan pencapaian Visi Pembangunan Daerah.



Gambar 4. Penandatanganan kerjasama Kepala Balitbangda Provinsi Jambi (Batik Hitam) dengan Pimpinan Instiper Yogyakarta (Batik Merah) yang disaksikan dengan Plt. Gubernur Jambi Dr. H. Fachrori Umar, M.Hum. (Batik Kuning)



Gambar 5. Foto bersama Plt. Gubernur Jambi (Batik kuning) dengan Pimpinan Instiper Yogyakarta usai Penandatanganan Mou dan Penandatanganan kerjasama oleh beberapa OPD Provinsi Jambi termasuk Balitbangda Provinsi Jambi dan Kuliah Umum yang disampaikan oleh Dr. H. Fachrori Umar, M.Hum.

B. Hambatan

Selain mencapai keberhasilan, ada beberapa hambatan yang dirasakan, antara lain:

1. Belum optimalnya peranan Balitbangda Provinsi Jambi dalam memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Belum termanfaatkan secara optimal hasil-hasil kajian dan pengembangan inovasi oleh OPD lain dalam upaya percepatan pencapaian target untuk pembangunan.
3. Masih kurangnya sarana prasarana berupa kendaraan operasional untuk mendukung kelancaran kegiatan penelitian di daerah.
4. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia aparatur baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk saat ini peneliti dan calon peneliti yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi berjumlah 11 orang, tetapi yang aktif untuk saat ini berjumlah 9 orang dikarenakan 2 orang mengikuti tugas belajar program Strata 3.

C. Solusi

1. Perkuatan peran Balitbangda Provinsi Jambi dalam memberikan rekomendasi kepada OPD lain dalam upaya percepatan pencapaian target untuk pembangunan.
2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
3. Sosialisasi dan publikasi hasil-hasil penelitian sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selaku pengguna teknologi (dibuat website hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi)
4. Perlu meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi fungsional peneliti untuk menarik minat pegawai dalam rangka rekrutmen calon peneliti (penambahan SDM fungsional peneliti) untuk mengisi jenjang jabatan peneliti dalam rangka kaderisasi sekaligus jabatan fungsional peneliti pada era pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga litbang lokal, nasional dan internasional (swasta dan pemerintah).
6. Terus mengupayakan dan mengusulkan peningkatan sarana prasarana penunjang yang memadai.

D. Kesimpulan

1. Balitbangda Provinsi Jambi merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, Renstra, Rencana Kerja dan Penetapan/Perjanjian Kinerja.
2. Laporan Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi menyajikan capaian kinerja strategis yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

E. Saran

1. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota dan dunia usaha.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual dibidang penelitian dan pengembangan
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Balitbangda Provinsi Jambi akan ditingkatkan untuk secara pro aktif. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

F. Lain-lain

Secara umum dari misi yang telah ditetapkan telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini terlihat dari prosentase pada tingkat program/kegiatan yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan dan keberhasilan ini juga telah didukung sepenuhnya oleh dinas / instansi / lembaga terkait baik lingkup provinsi/kab/kota serta perguruan tinggi.

Laporan Kinerja merupakan manifestasi dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dijadikan rujukan dalam Menyusun

Laporan Kinerja sekaligus merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi tahun 2018.

Demikian semoga Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi oleh pihak-pihak yang memerlukan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Balitbangda Provinsi Jambi, sekaligus sebagai bahan pembelajaran bagi Aparatur Balitbangda Provinsi Jambi guna perbaikan dimasa mendatang.

Jambi, 2019

KEPALA BALITBANGDA
PROVINSI JAMBI,

Ir. AZRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19662404 199203 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Periode	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Rp (juta)	T
				Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan surat menyurat	Jumlah surat keluar		78	8000 lbr	109	8000 lbr	120	8000 lbr	152	8000 lbr	214	8000 lbr	299	8.000 lbr	300	48
	Penyediaan jasa komunikasi Sumberdaya Air dan listrik	Periode pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik		170	12 bulan	238	12 bulan	250	12 bulan	333	12 bulan	466	12 bulan	653	12 bulan	700	72
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan		135	12 bulan	189	12 bulan	200	12 bulan	264	12 bulan	370	12 bulan	518	12 bulan	600	72
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan		120	1 paket	168	1 paket	190	1 paket	235	1 paket	329	1 paket	460	1 paket	500	6
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor		40	47 jenis	56	47 jenis	112	47 jenis	156	47 jenis	219	47 jenis	307	47 jenis	400	26
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah dan Jenis Buku		40	3 paket	56	3 paket	56	3 paket	60	3 paket	75	3 paket	80	3 paket	85	18
	Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Jumlah bahan pengandaan dan cetakan		25	10 jenis	35	10 jenis	40	10 jenis	49	10 jenis	68	10 jenis	96	10 jenis	100	6
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik		12.000	1 paket	16	1 paket	20	1 paket	23	1 paket	32	1 paket	46	1 paket	50	6
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu		50	500 org	70	500 org	80	500 org	98	500 org	137	500 org	192	500 org	300	30
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		400	35 kali	560	35 kali	650	35 kali	784	35 kali	1.097	35 kali	1.536	35 kali	1.600	2

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Periode	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Rp (juta)	T
				Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	T
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional		400	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	560	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	600	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	784	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	1.097,6	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	1.536,6	1 unit roda 2 unit roda 2	1.800	6 un uni
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor		135	1 paket	189	1 paket	200	1 paket	264	1 paket	370	1 paket	518	1 paket	600	6
	Pengadaan peralatan gedung/kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor		58	1 paket	81	1 paket	90	1 paket	113	1 paket	159	1 paket	222	1 paket	300	6
	Pengadaan mebeleur	Jumlah /jenis pengadaan mebeleur		45	1 paket	63	1 paket	70	1 paket	88	1 paket	123	1 paket	172	1 paket	200	6
	Pengadaan Alat Studio	Jumlah /jenis pengadaan Alat Studio		50	1 paket	65	1 paket	75	1 paket	89	1 paket	120	1 paket	170	1 paket	200	6
	Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer, laptop dan printer.		120	1 paket	168	1 paket	180	1 paket	235	1 paket	329	1 paket	460	1 paket	600	6
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung /kantor	Jumlah unit kantor		250	1 paket	350	1 paket	400	1 paket	490	1 paket	686	1 paket	960	1 paket	1.000	6
	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara		450	1 ta hun	630	1 ta hun	700	1 tahun	882	1 tahun	1.234	1 tahun	1.728	1 tahun	1.900	6
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan listrik dan elektronik	Jumlah peralatan listrik dan elektronik yang terpelihara		32.000	1 ta hun	44.800	1tahun	50.000	1 tahun	62.720	1 tahun	87.808	1 tahun	122.931	1 tahun	1.500	6
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pedriengkapan gedung kantor yang terpelihara		250	1 tahun	350	1 ta hun	400	1 tahun	490	1 tahun	686	1 tahun	960	1 tahun	1.200	6

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Periode	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Rp (juta)	T
				Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
	Pemeliharaan Berkala rutin peralatan gedung kantor	Jumlah /jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		100	1 ta hun	140	1 ta hun	160	1 tahun	196	1 tahun	274	1 tahun	384	1 tahun	500	6
	Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	Jumlah rumah gedung kantor yang direhab		3.000	1 ta hun	4.200	1 paket	5.000	1 paket	5.880	1 paket	8.232	1 paket	11.524	1 paket	15.000	6
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		1.000	1 paket	2.500	1 paket	3.500	1 paket	5.500	1 paket	6.000	1 paket	15.000	1 paket	18.000	6
	Pengadaan Peralatan Inkubator	Jumlah Mesin Inkubator		175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 un
	Pengadaan Mesin Penggiling Karet	Jumlah Penggiling Karet		125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 un
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng kapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	4
	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	4
	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	4
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal/ bintek		200	4 org	280	4 org	300	4 org	392	4 org	548	4 org	768	4 org	900	2

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Periode	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Rp (juta)	T
				Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	T
	formal																
	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m
	Litbang Subbid Ekonomi																
	Litbang Subbid SDA dan Lingk. Hidup	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m
	Litbang Subbid Pengembangan Wilayah, Fisikdan Prasarana	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m
	Litbang Subbid Sosial dan Budaya	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m
	Litbang Subbid Kependudukan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m
	Litbang Subbid Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m
	Litbang Subbid Penyeenggaraan Pemerintahan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m
	Litbang Subbid Pemerintahan Desa	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m
	Litbang Subbid Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m
	Litbang Subbid Inovai dan Pengemb. Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m

		Litbang Subbid Difusi Inovai dan Penerapan Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m
		Litbang Subbid Diseminasi Kelitbangan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m
		Penelitian Mandiri	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m
		Penelitian Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 m
		Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Rakor dan Forum Kelitbangan	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	250	2 kali	350	2 kali	400	2 kali	490	2 kali	686	2 kali	960	2 kali	1.100	1
		Monitoring dan Evaluasi Hasil-hasil Kinerja BAIitbangda	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	250	12 buku	300	12 buku	330	12 buku	375	12 buku	521	12 buku	729	12 buku	850	72 b
		Dewan Riset Daerah (DRD)	Jumlah rekomendasi yang disusun	450	1 Reko mendasi	630	1 Reko mendasi	700	1 Reko mendasi	882	1 Reko mendasi	1.234	1 Reko mendasi	1.728	1 Reko mendasi	1.900	6 m
		Penerbitan Jurnal Litbang	Jumlah Jurnal yang terbit	250	3 kali terbit	300	3 kali terbit	350	3 kali terbit	392	3 kali terbit	548	3 kali terbit	768	3 kali terbit	800	18 b
		Peningkatan Kompetensi Peneliti	Jumlah seminar, lokakarya,workshop yang diuukti	300	5 Orang	357	5 orang	400	5 orang	499	5 orang	699	5 orang	979	5 Orang	1.100	30
		Penguatan Jaringan penelitian di Provinsi Jambi	Jumlah kerjasama	400	1Kerjasama	560	1Kerjasama	600	1Kerjasama	784	1Kerjasama	1.096	1 Kerja sama	1.600	1 Kerjasama	1.750	6 Ke
		Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Kelembagaan Intelektual (HKI) Produk Unggulan Provinsi Jambi	Jumlah Buku Persyaratan IG	224	1 Buku Persyaratan IG	490	1 Buku Persyaratan IG	550	1 Buku Persyaratan IG	686	1 Buku Persyaratan IG	960	1 Buku Persyaratan IG	1.344	1 Buku Persyaratan IG	1.900	6 Per
		Diseminasi Dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	Jumlah Pertemuan	257	4 Pertemuan	359	4 Pertemuan	400	4 Pertemuan	503	4 Pertemuan	705	4 Pertemuan	987	4 pertemuan	1.050	per
		Sumber Daya Genetik Produk Unggulan	Jumlah Buku Khasanah IG	175	1 kali sosialisasi	245	1 kali sosialisasi	245	1 kali sosialisasi	300	1 kali sosialisasi	480	1 kali sosialisasi	660	1 kali sosialisasi	800	so

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Periode	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Rp (juta)	T
				Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	T
	Seminar Nasional	Jumlah judul yang diseminarkan		125	10 Judul	140	10 Judul	150	10 Judul	165	10 Judul	185	10 Judul	200	10 Judul	500	60 J
	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Roadmap SIDA		200	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	280	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	300	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	392	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 1 Inovasi OPD	548	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 1 Inovasi OPD	768	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 1 Inovasi OPD	900	6 R S Kab/ 3
	Science Park	Jumlah SP		2.700	1 Pembangunan Fisik	3.780	1 Pembangunan Fisik	4.000	1 Pembangunan Fisik	5.292	1 Pembangunan Fisik	7.408	1 Pembangunan Fisik	10.372	1 Pembangunan Fisik	12.000	Per a
	Pengembangan Pusat Teknologi Reklamasi Lahan	Jumlah Laporan Reklamasi lahan		198	1 Rekomendasi	350	1 Rekomendasi	360	1 Rekomendasi	388	1 Rekomendasi	543	1 Rekomendasi	760	1 Rekomendasi	900	6 m
	Pengembangan Sentra Promosi IPTEK	Jumlah inovasi teknologi yang dihasilkan		350	6 TTG 12 KTI	490	6 TTG 12 KTI	550	6 TTG 12 KTI	686	6 TTG 12 KTI	960	6 TTG 12 KTI	1.344	6 TTG 12 KTI	1.500	3 7
	Penerapan & Pengembangan Chitin Chitosan	Jumlah Pelatihan Pembuatan Chitin-Chitosan		125	1 kali	130	1 kali	135	1 kali	145	1 kali	175	1 kali	200	1 kali	500	5 ka

LAMPIRAN 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI**

OPD	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Dasar	:	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Tugas	:	Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;2. Penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan provinsi;5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi dan teknologi;6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;7. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah provinsi;8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada balitbangda; dan9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Indikator Kinerja Utama :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Hitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan Stakeholder.	Persentase Rekomendasi yang diaplikasikan stakeholder	Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 (Rekomendasi yang sudah diaplikasikan/Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan) X 100%	Balitbangda	Laporan Kegiatan Akhir
Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk Unggulan dan meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah	1. Persentase Kelembagaan SIDa 2. Persentase Produk Unggulan yang dihasilkan 3. Persentase KTI dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan	Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 03 Tahun 2012 dengan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah 1. (Kelembagaan SIDa yang terbentuk/Kelembagaan SIDa yang digali) X 100% 2. (Produk Unggulan yang sesuai persyaratan IG/Produk Unggulan yang digali) X 100% 3. (Jumlah KTI dan TTG yang menjadi juara /Jumlah KTI dan TTG yang menjadi juara) X 100%	Balitbangda	Laporan Kegiatan Akhir
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian	Persentase hasil publikasi penelitian yang mampu diakses masyarakat	Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 (Jumlah Informasi yang bisa diakses/Jumlah total Informasi yang ditampilkan) X 100%	Balitbangda	Laporan Kegiatan Akhir
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik IKM = Nilai Persepsi pada angka 3, Nilai Interval Konversi = 78 Mutu Pelayanan B Kriteria Baik	Balitbangda	Laporan Kegiatan Akhir

Jambi,
KEPALA BADAN,

2018

Ir. AZRIN, M.Si.
NIP. 19662404 199203 1 002

LAMPIRAN 3. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Ir. AZRIN, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda) Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : **Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**

Jabatan : Plt. Gubernur Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. FACHRORI UMAR, M.HUM

Jambi,

Pihak Pertama,

Ir. AZRIN, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19660224 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PK)

ORGANISASI

PERANGKAT

DAERAH

: BALITBANGDA PROVINSI JAMBI

THN. ANGGARAN

: 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Persentase Rekomendasi yang diaplikasikan <i>stakeholder</i>	80%
2	Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk Unggulan dan meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah	1. Persentase Kelembagaan SIDa 2. Persentase Produk Unggulan yang dihasilkan 3. Persentase KTI dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan	1. 80% 2. 75% 3. 100%
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian	Persentase hasil publikasi penelitian yang mampu diakses masyarakat	70%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM 78

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran	821.034.300,00	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	378.480.000,00	APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45.000.000,00	APBD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49.090.000,00	APBD
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	18.081.000,00	APBD
6. Program Penelitian dan Pengembangan	2.178.098.250,00	APBD
7. Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	981.128.450,00	APBD
8. Program Pengembangan Inovasi dan teknologi Daerah	612.088.000,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	5.000.000.000,00	

Jambi, 2018

GUBERNUR JAMBI,

KEPALA BALITBANGDA,
PROVINSI JAMBI

Dr. H. FACHRORI UMAR, M.HUM

Ir. AZRIN, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19660224 199203 1 002

LAMPIRAN 5. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Ir. AZRIN, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda) Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : **Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**

Jabatan : Plt. Gubernur Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. FACHRORI UMAR, M.HUM

Ir. AZRIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660224 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PK)

OPD : BALITBANGDA PROVINSI JAMBI

THN. ANGGARAN : 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya rekomendasi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Persentase Rekomendasi yang diaplikasikan <i>stakeholder</i>	80%
2	Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk Unggulan dan meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptakan Inovasi Teknologi berbasis ilmiah	1. Persentase Kelembagaan SIDa 2. Persentase Produk Unggulan yang dihasilkan 3. Persentase KTI dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan	1. 80% 2. 75% 3. 100%
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi hasil penelitian	Persentase hasil publikasi penelitian yang mampu diakses masyarakat	75%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM 78

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran	804.379.800,00	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	425.236.900,00	APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	52.000.000,00	APBD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.760.000,00	APBD
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	6.600.000,00	APBD
6. Program Penelitian dan Pengembangan	1.992.654.650,00	APBD
7. Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	1.085.080.650,00	APBD
8. Program Pengembangan Inovasi dan teknologi Daerah	578.288.000,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	5.000.000.000,00	

Jambi, Januari 2019

GUBERNUR JAMBI,

KEPALA BALITBANGDA,
PROVINSI JAMBI

Dr. H. FACHRORI UMAR, M.HUM

Ir. AZRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660224 199203 1 002

